



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018



LKIP TAHUN 2018



Jl. Majapahit No.17 Telp. 0370-631502 - 631724,
Fax. 0370-641151 Mataram (83117)



bappenda@ntbprov.go.id



[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)



[@bappenda.ntb](https://twitter.com/bappenda.ntb)



www.bappenda.ntbprov.go.id



[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2018, serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output*, *outcomes* maupun *impact* di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Mataram, Februari 2019

Kepala BAPPENDA
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. H. Iswandi, M.Si
NIP. 19651231 199403 1 153



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disingkat Bappenda, merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LKjIP ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.

LKjIP Tahun 2018 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Bappenda Provinsi NTB semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Kuat dan Amanah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan Komitmen Bappenda Provinsi NTB.

Penyusunan LKjIP Tahun 2018 Bappenda Provinsi NTB merupakan hasil kinerja selama tahun 2018 atau tahun terakhir (ke 5) dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi NTB tahun 2013-2018 yang telah direvisi pada bulan Februari 2017.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2013-2018. Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2018 ditetapkan 6 sasaran strategis dengan beberapa indikator kinerja sasaran.

Ringkasan capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB yang dihasilkan sampai 31 Desember 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

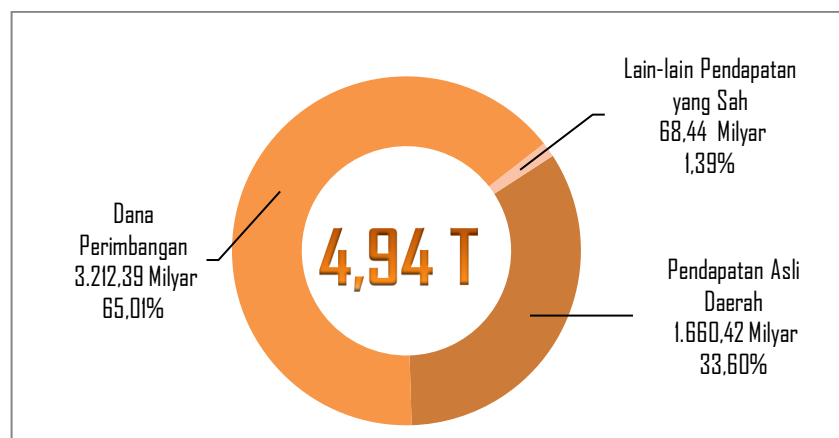
- a. Sasaran IKU: Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikatornya Pertumbuhan PAD, capaiannya -18,78%;
- b. Sasaran 1: Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah, dengan indikator Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK (103,61%); Jumlah Penerimaan PAD (93,93%); Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (77,01%); dan Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi (98,27%);
- c. Sasaran 2: Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya (88,46%); Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah



- (35,76%); Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan (96,40%); dan Jumlah Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah (89,02%);
- d. Sasaran 3: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat rerata nilai per sentra layanan (93,36%); dan Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM berkriteria "Sangat Baik" (20,00%);
 - e. Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur, dengan indikator kinerja Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP" (100%); Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO (100%); Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (95,14%); dan Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif (92,71%);
 - f. Sasaran 5: Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan Inovasi layanan pendapatan daerah, dengan indikator kinerja Tingkat Keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (99,72%).

Pendapatan daerah tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp 4.941.246.974.629,00 atau 92,18% dari target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2018 yang diproyeksi sebesar Rp 5.360.502.949.869,00. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp. 1.660.417.707.373,00 Dana perimbangan sebesar Rp 3.212.386.689.010,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp. 68.442.578.246,00. Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat dalam diagram doughnut sebagai berikut:

Kontribusi per jenis komponen
terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018



Kontribusi Dana Perimbangan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2018 sebesar 65,01% masih lebih besar dibandingkan kontribusi PAD sebesar 33,60%, begitupula pada tahun 2017 dimana kontribusi Dana Perimbangan sebesar



64,24%, PAD 33,21% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 2,55%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu Pertama, Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya masih rendah dan perlu terus distimulasi dan dimasyarakatkan melalui berbagai even sosiaialisai, agar dapat meningkatkan kinerja dalam memenuhi ketersediaan pendanaan daerah. Kedua, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib PKB dan BBNKB, baik sarana prasarana pendukung; kesiapan sumber daya pengelola, modernisasi sistem layanan dan standardisasi layanan prima; dan ketiga penyiapan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan.

Pencapaian Rencana Strategik Bappenda Provinsi NTB tahun 2018 sebanyak 17 indikator, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 13 (tigabelas) indikator sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80 %
2. 2 (dua) indikator sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90 %
3. 0 (nol) indikator sasaran yang dicapai dengan nilai 50 – 59,90 %
4. 2 (dua) indikator sasaran dicapai dengan nilai < 49,9 %

Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Bappenda Provinsi NTB dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Operasional	3
1. 3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	5
1. 4 Sistematika Penyusunan Laporan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Kinerja	13
2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	24
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategik.....	25
3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik”	26
3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018	38
3.5 Realisasi Anggaran	40
3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Bappenda terhadap Pencapaian Indikator Utama Pemerintah Provinsi NTB	45
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN	
~ Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018	
~ Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	
~ SK Tim Penyusun LKjIP	
~ Cascading Indikator Kinerja 2018	
~ Pohon Kinerja	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2018	8
Tabel 1.2 Data Sarana dan Fasilitas Fisik Bappenda NTB s/d Tahun 2018	10
Tabel 2.1 Kaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja yang telah disepakati	20
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Belanja Bappenda NTB Tahun 2018	21
Tabel 3.1 Tabel komparasi capaian kinerja Tahun 2017 dan 2018.....	25
Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.....	26
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018	27
Tabel 3.4 Jumlah kendaraan bermotor menurut kabupaten/kota dan potensi Wajib Pajak yang melakukan Daftar Ulang obyek kendaraan bermotornya sampai 31 Desember 2018.....	29
Tabel 3.5 Banyaknya kendaraan bermotor tercatat menurut kabupaten/kota dan jenis kendaraan sampai dengan 31 Desember 2018.....	29
Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2	30
Tabel 3.7 Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Rekonsiliasi Data Retribusinya tahun 2018	30
Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3	32
Tabel 3.9 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat di 10 UPTB-UPPD Kab/Kota .	32
Tabel 3.10 Jumlah Wajib Pajak yang melakukan Daftar Ulang Kendaraan Bermotornya	33
Tabel 3.11 Jumlah Sentra pelayanan yang memperoleh penilaian dengan kriteria IKM Sangat Bagus	34
Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4	35
Tabel 3.13 Rasio cakupan sentra layanan Perpajakan daerah terhadap	36
Tabel 3.14 Data aparatur yang telah mengikuti diklat teknis substantif	36
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5	37
Tabel 3.16 Data gangguan sistem jaringan diseluruh sentra layanan	37
Tabel 3.17 Capaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan terhadap target.	38



Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2018 dengan Target Kinerja Jangka Menengah	39
Tabel 3.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2018	40
Tabel 3.20	Analysis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2018	44
Tabel 3.14	Analysis Efektivitas Pendapatan Tahun 2018	37
Tabel 3.15	Realisasi Capaian IKU Provinsi NTB Tahun 2018	46



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	Kontribusi per jenis komponen terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018	
Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Bappenda Provinsi NTB.....	7
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi UPTB – UPPD	7
Gambar 1.3	Tingkat Pendidikan PNS dan Gender Bappenda Provinsi NTB	9
Gambar 1.4	Jumlah pegawai Induk dan UPTB – UPPD Bappenda.....	9
Gambar 3.1	<i>Diagram Clustered Collumn</i> kontribusi per jenis komponen pendapatan daerah tahun 2017 dan 2018	27
Gambar 3.2	Setifikat ISO:9001-2015 untuk UPTB Mataram dan Praya....	35
Gambar 3.3	Realisasi per komponen Pajak Asli Daerah Tahun 2018	42

BAB I

PENDAHULUAN



PERFORMANCE REPORT
LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018



BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *Clean Governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bappenda Provinsi NTB diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh OPD Bappenda Provinsi NTB;
2. Mendorong OPD Bappenda Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Bappenda Provinsi NTB untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Meningkatkan/memupuk kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan OPD Bappenda Provinsi NTB dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator penting dari kewenangan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dalam sistem Negara manapun di dunia, hampir tidak dijumpai kondisi dimana pengeluaran daerah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu unsur organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, dan berperan



dalam penyediaan dana pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappenda Provinsi NTB tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yang secara garis besar dititik beratkan pada aspek pendapatan dan aspek pelayanan, disamping aspek Regulasi, aspek Sumberdaya Aparatur dan aspek Sarana Prasarana.

Dari Aspek Regulasi diketahui bahwa masih rendahnya Pemahaman masyarakat terkait Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga masyarakat perlu distimulasi terus untuk menggugah kesadaran dan mewujudkan peningkatan kepatuhan, melalui berbagai aksi diantaranya pekan panutan pajak dan gebyar pajak yang memasukkan unsur unsur sosialisasi dan memasyarakatkan taat pajak. Pada Aspek Pendapatan yang masih terasa adalah belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi & Sinergitas yang baik antara Provinsi dan Kab/Kota, terutama kesamaan persepsi OPD-OPD pengelola Pendapatan yang belum terbangun secara sinergis menyebabkan tidak optimalnya perolehan pendapatan Retribusi Daerah. Disisi lain masyarakat menuntut perbaikan layanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai wujud terselenggaranya reformasi birokrasi guna terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Disisi aspek sarana prasarana layanan, terus menerus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya untuk terciptanya kenyamanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, artinya masyarakat tidak harus melangkah jauh untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Dan terakhir aspek sumber daya aparatur yang secara berkesinambungan terus diupgrade sebagai daya ungkit dengan daya adaptive tinggi dengan perkembangan dan situasi kekinian yang menuntut profesionalitas dan kecakapan dalam melayani dengan pelayanan terstandarisasi.

Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB antara lain :

1. Melemahnya perkonomian masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan membayar pajak;
2. Validitas data potensi dan obyek pendapatan belum akurat;
3. Kualitas pengelolaan pelayanan pendapatan masih rendah;
4. Dukungan Teknologi Informasi dalam upaya intensifikasi pendapatan daerah belum maksimal; dan
5. Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah belum optimal.



Guna menjawab isu strategis tersebut Bappenda Provinsi NTB telah mengikhtiarkan langkah-langkah yang sekiranya dapat mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi.

1.2 LANDASAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah, Bappenda Provinsi NTB berpedoman kepada semua peraturanPerundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya secara yuridis tidak menimbulkan berbagai gejolak yang dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bappenda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pasal 6 huruf (c) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan. Lebih lanjut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Bappenda Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan (kewenangan Daerah).

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, Bappenda Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1. Susunan Organisasi

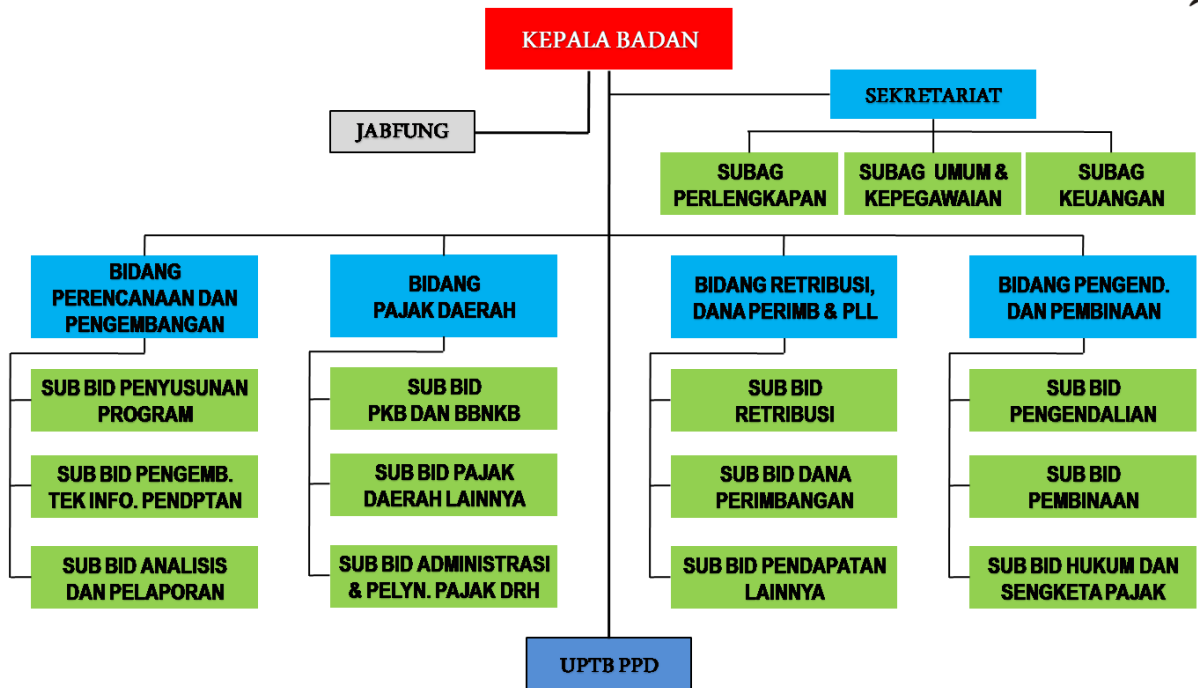
OPD Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan;
 - 3) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan.

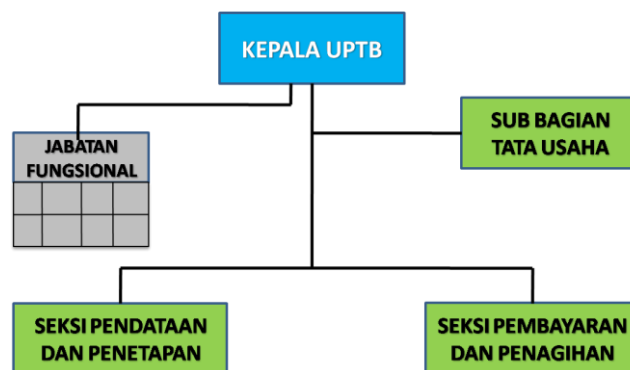


- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3) Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah.
- e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
 - 3) Sub Bidang Pendapatan Lainnya.
- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan; dan
 - 3) Sub Bidang Hukum dan Sengketa Pajak.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
 - b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
 - c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
 - d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
 - e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
 - f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
 - g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
 - h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
 - i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
 - j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Bappenda sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Bappenda



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi UPTB -Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)

Core Bussines Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
- 3) Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- 5) Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik



1.3.1. Keadaan Pegawai

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappenda Provinsi NTB menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam dua bidang teknis, didukung oleh sembilan Unit Pelaksana Teknis Badanselakigus sebagai Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB UPPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, dan satu Sekretariat serta dua bidang lainnya yang menjalankan fungsi penjuang dalam mendukung peningkatan Pelayanan Publik. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

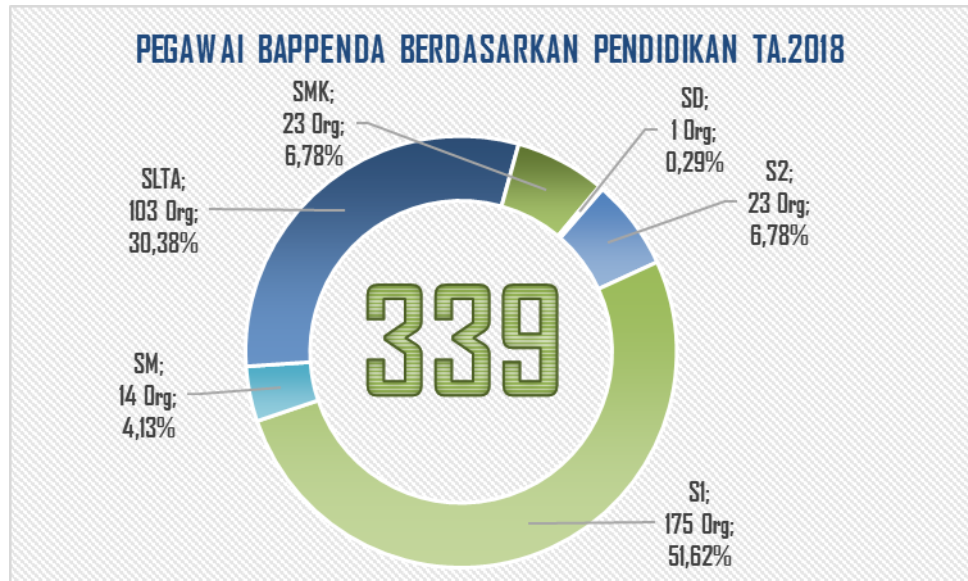
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Bappenda Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2018 didukung oleh 339 orang PNS yang terdiri dari 20 PNS golongan IV, 206 PNS golongan III, 112 PNS golongan II dan 1 PNS golongan I, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.

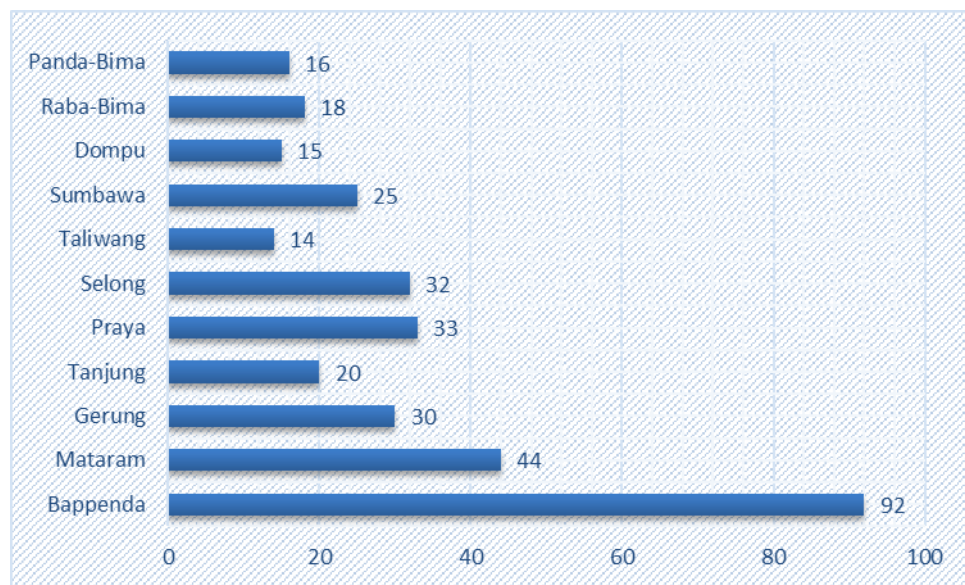
Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB
Berdasarkan Pendidikan dan Golongan Per 31 Desember 2018

UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JML	GENDER		GOLONGAN			
	S2	S1	SM	SLTA	SMK	SD		L	P	IV	III	II	I
BAPPENDA (INDUK)	12	46	5	24	4	1	92	47	45	7	59	25	1
KOTA MATARAM	1	18	3	15	7	0	44	17	27	1	24	19	0
LOMBOK BARAT	0	18	1	10	1	0	30	21	9	1	19	10	0
TANJUNG KLU	1	10	1	7	1	0	20	17	3	1	12	7	0
LOMBOK TENGAH	1	15	0	15	2	0	33	26	7	1	18	14	0
LOMBOK TIMUR	2	17	3	9	1	0	32	24	8	1	21	10	0
SUMBAWA BARAT	1	6	0	5	2	0	14	11	3	1	6	7	0
SUMBAWA BESAR	4	12	1	5	3	0	25	16	9	4	16	5	0
DOMPU	0	10	0	4	1	0	15	8	7	0	10	5	0
RABA (Kota Bima)	0	13	0	5	0	0	18	11	7	1	12	5	0
PANDA - Kab. BIMA	1	10	0	4	1	0	16	11	5	2	9	5	0
JUMLAH	23	175	14	103	23	1	339	209	130	20	206	112	1

Sumber: Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018



Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pendidikan PNS dan Gender Bappenda Provinsi NTB (31 Desember 2018)



Gambar 1.4 Grafik Jumlah pegawai Induk dan UPTB – UPPD Bappenda Provinsi NTB (31 Desember 2018)

1.3.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Urusan dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya urusan tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola.

Data sekunder sarana dan prasarana fasilitas fisik pada Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai akhir tahun 2018 sebagai berikut:



Tabel 1.2.
Data Sarana dan Fasilitas Fisik Bappenda Provinsi NTB s/d Tahun 2018

No	Akun Neraca	Nilai BMD Tahun 2018 Se NTB [Jutaan Rupiah]			
		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp.)
			Tambah	Kurang	
A.	ASET LANCAR				
1	Persediaan	1.085,47	225,39	524,33	786,52
	Jumlah	1.085,47	225,39	524,33	786,52
B.	ASET TETAP				
1	Tanah	2.237,95	-	-	2.237,95
2	Peralatan dan Mesin	5.355,32	340,36	623,92	5.071,76
3	Gedung dan Bangunan	8.615,11	-	50,65	8.564,47
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	224,07	-	-	224,07
5	Aset Tetap Lainnya	49,19	-	-	49,19
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	Jumlah	16.481,64	340,36	674,56	16.147,44
C.	ASET LAINNYA				
1	Aset Tidak Berwujud	620,90	49,23	-	670,12
2	Aset Lain-lain (RB)	1.235,80	-	1.190,55	45,26
3	Hibah ke Masyarakat	-	-	-	-
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Jumlah	1.856,70	49,23	1.190,55	715,38
	Jumlah Keseluruhan A + B + C	19.423,81	614,97	2.389,44	17.649,34

Sumber : Laporan Inventaris Barang Daerah Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018 , diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana dan prasarana pendukung ketugasan Bappenda Provinsi NTB telah memenuhi kebutuhan sesuai beban kerja secara administratif.

1.3.3. Keuangan

Pada Tahun 2018 Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 104.638.696.039,00 (DPPA) dengan realisasi sebesar Rp. 100.185.897.788,00 (95,74%) terdiri dari 8 program dan 46 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp.)	Capaian (%)
Belanja Langsung	50.025.918.000	46.375.998.971	92,70
Belanja Tidak Langsung	54.612.778.039	53.809.898.817	98,53
Total	104.638.696.039	100.185.897.788	95,74



1.4 SITEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel/Grafik
Daftar Gambar
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Operasional
- 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
- 1.4 Sitematika Penyusunan Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Perencanaan Kinerja
- 2.2 Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

- 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja;
- 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategik;
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik;
- 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2018;
- 3.5 Realisasi Anggaran;
- 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.7 Dukungan Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi NTB terhadap Pencapaian Indikator Utama Pemerintah Provinsi NTB

Bab IV Penutup

Lampiran – lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Indikator Kinerja Utama
- SK Tim Penyusun LKjIP
- Pohon Kinerja
- Cascading Indikator Kinerja 2018

BAB II



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



PERFORMANCE REPORT
LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB antara lain :

1. Isu-isu strategis bidang pengelolaan pendapatan daerah:
 - a. Melemahnya perekonomian global yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan membayar pajak;
 - b. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah;
 - c. Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah;
2. Isu-isu strategis bidang pelayanan publik:
 - a. Pengelolaan pelayanan pendapatan di SAMSAT (public service);
 - b. Dukungan teknologi informasi dalam upaya intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.

Dari isu-isu strategis yang telah dicermati dan diskoring tersebut, barulah langkah berikutnya untuk menentukan perencanaan strategis yang akan dijadikan panduan untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan timbul dikemudian hari. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tantangan sistem manajemen nasional.

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi NTB yang telah direvisi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Gubernur beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan berupa dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

a. Visi

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappenda yang bertugas sebagai organisasi yang menangani pengelolaan pendapatan daerah dan setelah diproses melalui penetapan atau pemilihan nilai-nilai pribadi, akhirnya dipilih salah satunya sebagai nilai-nilai organisasi, maka disepakati VISI BAPPENDA dengan rumusan:

**MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
YANG KUAT DAN AMANAH**

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa visi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut mengandung pengertian adanya keinginan dan cita-cita yang kuat dari Bappenda untuk mengembangkan pendapatan Daerah melalui pemantapan



Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD dengan fokus pada peningkatan PAD, namun tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Misi

Dalam rangka mendukung visi, telah pula ditetapkan dan dirumuskan misi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 5 Misi sebagai berikut:

1. Merumuskan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Melaksanakan Pelayanan Samsat Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Melaksanakan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
4. Melaksanakan Pengendalian, Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
5. Melaksanakan Peningkatan Kinerja dan Profesionalitas SDM Pendapatan Daerah

Nilai-nilai organisasi menjelaskan bagaimana seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas mencapai visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bappenda Provinsi NTB telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari IHSAN, yang diharap mampu menjadi daya ungkit dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tersebut diatas dengan rumusan sebagai berikut:

1. **Integritas**
Bekerja dengan penuh integritas, selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasi;
2. **Harmonis**
Membangun suasana kerja yang harmonis menjadi satu tim kerja yang solid dengan saling menasehati;
3. **Sinergi**
Mewujudkan sinergi sebagai budaya kerjasama antar individu dan berbagai pihak yang terkait untuk mencapai hasil yang lebih besar;
4. **Amanah**
Menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat;
5. **Niat**
Seluruh aktivitas dan perkhidmatan dalam tugas selalu dibarengi dengan niat sebagai amal ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan;

Percepatan pembangunan diperlukan agar NTB bias berlari lebih cepat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan dinisbatkan untuk meningkatkan marwah atau kehormatan kolektif masyarakat NTB di pentas pergaulan nasional. Untuk itu itulah visi NTB Bersaing harus menjadi barometer seluruh



perangkat daerah dan masyarakat, yang menginspirasi bergemanya TGB Spirit sebagai persembahan terbaik untuk NTB, yakni:

- Kerja keras;
- Kesungguhan;
- Komitmen;
- Kebersamaan; dan
- Keberpihakan kepada rakyat.

c. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Bappenda Provinsi NTB mampu secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan. Memformulasikan tujuan strategis ini dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan strategis ini juga akan memungkinkan Bappenda Provinsi NTB untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai. Untuk mengukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan diikuti dengan indikator kinerja yang terukur. Bertolak dari pernyataan visi dan misi, maka tujuan strategis yang hendak diwujudkan oleh Bappenda Provinsi NTB dalam periode 2013 – 2018 secara garis besar berbasis pada tugas dan fungsi bidang selaku eksekutor program.

Untuk lebih jelasnya, kaitan antara misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI-1 : MERUMUSKAN RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemantapan Kinerja kelembagaan dalam pengembangan pengelolaan pendapatan daerah	1	1.1	Mempertajam sistem pengendalian kinerja
		1.2	Mengapresiasi kemampuan aparatur yang memiliki unjuk kinerja yang kreatif dan inovatif
		1.3	Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi
		1.1.1	Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji
		1.2.1	Memacu dan mendorong UPTB/ Samsat utk menunjang kinerja teratas dengan mengelaborasi model pengukuran teruji dan menjadi trigger bagi UPTB lainnya.
		1.3.1	Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan,



TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
						pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
					1.3.2	Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e – Samsat OnLine)
		1.4	Terus mengupgrade kemampuan brainware dan selalu adaptiv dengan perubahan dan perkembangan teknologi Informasi	1.4.1	Mendorong upaya peningkatan wawasan dan menimba pengalaman daerah lain yang lebih dahulu menerapkan inovasi teknologi kesamsatan	
MISI-2 : MELAKSANAKAN PELAYANAN SAMSAT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR						
Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang makin optimal	1	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah.	1.1	Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif	1.1.1	Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;.
			1.2	Optimalisasi pemungutan PBB, PPh OPDN dan PPh Pasal 21, PPh Badan dan Pajak Ekspor	1.2.1	Memperkuat kinerja pemungutan PPh OPDN, PPh Pasal 21 PPh Badan serta Pajak Ekspor melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan nasional;
	2	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	2.1	Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;	2.1.1	Melanjutkan validasi potensi PADmaupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;
MISI-3 : MELAKSANAKAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH						
Meningkatkan potensi penerimaan Retribusi daerah	1	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	1.1	Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;	1.1.1	Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			dibidang perpajakan dan retribusi
		1.2	Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan
		1.3	Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder
			1.3.1 Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif
			1.3.2 Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah
		1.4	Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif
			1.4.1 Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;
			1.4.2 Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah
		1.5	Optimalisais pengelolaan asset dan keuangan daerah
			1.5.1 Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah
		1.6	Peningkatan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan
			1.6.1 Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan.
		1.7	Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dgn unsur pemerintah pusat
			1.7.1 Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat
MISI-4 : MELAKSANAKAN PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH			
Mewujudkan kepuasan pelayanan prima	1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	1.1
			1.1.1
			Menerapkan SOP yang makin teruji;
			Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		1.2 Memangkas prosedur layanan yang kurang efektif dan menghambat kenyamanan publik	1.2.1 Berkoordinasi dengan stakeholder kompeten untuk memotong jalur birokrasi rumit yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan penerimaan pendapatan daerah
		1.3 Mengimplementasikan evaluasi kinerja pelayanan kesamsatan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.3.1 Introspeksi kinerja pelayanan kelembagaan mengenai tingkat kepuasan masyarakat melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat/opini masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara layanan publik
		1.4 Menggerakkan seluruh elemen sumberdaya dalam mengurangi tunggakan piutang wajib pajak	1.4.1 Mendukung upaya optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah
MISI-5 : MELAKSANAKAN PENINGKATAN KINERJA DAN PROFESIONALITAS SDM			
Memantapkan Kinerja Organisasi dengan dukungan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya	1	1.1 Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif	1.1.1 Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
		1.2 Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi	1.2.1 Memperkuat pembinaan teknis fungsional seluruh OPD penghasil.
			1.2.2 Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.
		1.3 Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang menjadi pusat komunitas public	1.3.1 Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah
		1.4 Mengikhtiarkan Zero Complain dan sapsras Pelayanan berstandar ISO	1.4.1 Menyempurnakan standarisasi sarana prasarana penunjang layanan;
		1.5 Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang menjadi pusat komunitas publik	1.5.1 Mengupdate tampilan sentra sentra pelayanan dengan sentuhan style kekinian dan penerapan inovasi
		1.6 Mengupayakan pendekatan layanan	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		kepada wajib pajak melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, dan penambahan waktu layanan	

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap Indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya adalah tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Bappenda Provinsi NTB untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi dinas.

2.2 PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 8 (delapan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan Tahun 2018 .



Kinerja Organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Selain itu juga faktor kepemimpinan berpengaruh dengan indikasi pada kemampuan pimpinan dalam membuat kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mengetahui rencana kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018, maka perlu adanya penjelasan dari elemen dari sasaran dan indikatornya.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung-jawab/kinerja dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya, dan akan diteruskan secara berjenjang mulai dari Eselon II ke Eselon III, dari Eselon III ke Eselon IV. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, dan secara tertulis akan ditandatangani dalam lembaran pakta integritas antara pemberi dan penerima amanah.

Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah (1) Intensifikasi pencegahan korupsi; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (3) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah : (1) Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur; (2) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun perjanjian kinerja yang telah disepakati dan tertuang dalam pakta integritas tahun 2018 yang telah direvisi sesuai proyeksi pendapatan, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Revisi
	Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan PAD	%	7,64	7,64
1	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	%	45,53	45,42
		2	Jumlah Penerimaan PAD	Milyar Rupiah	1.719,19	1.767,75
		3	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	%	62,37	62,37



No	Saaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Revisi
		4	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	WP	1.686.707	1.686.707
2	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	5	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	%	100	100
		6	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rupiah	33,29	59,49
		7	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rupiah	3.281,37	3.332,31
		8	Jumlah Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar Rupiah	229,73	415,02
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	9	Indeks Kepuasan Masyarakat rerata nilai per sentra layanan	%	82,50	82,50
		10	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	%	37,63	37,63
		11	Jumlah Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Kali	1.017	1.017
		12	Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM ber kriteria "Sangat Baik"	Unit	10	10
4	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	13	Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP"	Dokumen	1	1
		14	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	Sentra	2	2
		15	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja	Rasio	1 : 110	1 : 110
		16	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	35	--
			Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif (Revisi)	Orang	--	119
5	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan Inovasi layanan pendapatan daerah;	17	Tingkat gangguan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	%	1,7	-
			Tingkat Keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (Revisi)	%	-	98,30



2.3.1. Program Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selamakurun waktu 2013 – 2018, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

- 1) Program Umum (Program yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi) :
 - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - e) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f) Program Reformasi Birokrasi; dan
 - g) Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset

2) Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka untuk mengoptimalkan kinerja organisasi, Bappenda Provinsi NTB dalam tahun anggaran 2018 menjalankan kebijakan pengelolaan pendapatan yang berorientasi pada *Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagai program utama/prioritas dengan sasaran “Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah”

Langkah dan upaya – upaya dalam rangka peningkatan PAD, pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui 8 (Delapan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan yang pengelolaannya pada 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

KODE	URAIAN	PAGU [DPPA] JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	%
BELANJA		104.638.696.039	100.185.897.788	95,74
4.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54.612.778.039	53.809.898.817	98,53
4.01.1	Belanja Pegawai	54.612.778.039	53.809.898.817	98,53
4.02	BELANJA LANGSUNG	50.025.918.000	46.375.998.971	92,70
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16.343.093.470	15.674.651.128	95,91
4.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	114.272.000	106.324.303	93,04
4.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.770.314.200	2.511.729.470	90,67
4.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	636.564.000	631.343.000	99,18
4.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.545.750.000	2.540.471.280	99,79
4.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	852.323.570	815.817.695	95,72
4.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.157.580.000	1.049.420.956	90,66
4.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	103.034.400	100.771.400	97,80
4.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.069.718.300	4.860.801.900	95,88
4.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90.822.000	83.972.500	92,46
4.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	585.500.000	579.609.093	98,99



KODE	URAIAN	PAGU [DPPA] JUMLAH (Rp)	REALISASI JUMLAH (Rp)	%
4.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	599.425.000	582.350.950	97,15
4.2.01.19	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	455.800.000	454.400.000	99,69
4.2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	1.361.990.000	1.357.638.581	99,68
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.248.711.490	11.734.072.777	95,80
4.2.02.03	Pembangunan gedung kantor	4.150.729.000	4.057.797.729	97,76
4.2.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.578.680.000	2.510.785.000	97,37
4.2.02.10	Pengadaan meubelair	832.469.000	765.881.300	92,00
4.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	480.432.000	460.013.118	95,75
4.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.549.680.000	1.341.106.495	86,54
4.2.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	244.032.000	228.588.900	93,67
4.2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	288.036.460	277.354.000	96,29
4.2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	2.124.653.030	2.092.546.235	98,49
4.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	391.428.500	321.004.188	82,01
4.2.04.01	Pendidikan dan pelatihan formal	198.762.500	146.678.188	73,80
4.2.04.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	192.666.000	174.326.000	90,48
4.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.011.285.000	954.406.796	94,38
4.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	303.760.000	292.108.000	96,16
4.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	192.200.000	186.082.700	96,82
4.2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	515.325.000	476.216.096	92,41
4.2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	305.145.000	294.753.500	96,59
4.2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	305.145.000	294.753.500	96,59
4.2.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	19.328.854.540	17.020.881.082	88,06
4.2.17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah	645.236.500	482.612.600	74,80
4.2.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	6.555.386.340	5.783.296.116	88,22
4.2.17.31	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	1.079.327.500	1.054.997.095	97,75
4.2.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	2.666.985.000	2.593.570.000	97,25
4.2.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.518.313.500	1.411.154.000	92,94
4.2.17.34	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	377.843.500	260.455.100	68,93
4.2.17.35	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	628.000.000	555.957.792	88,53
4.2.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	971.840.000	912.760.429	93,92
4.2.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	1.256.735.000	1.244.885.000	99,06
4.2.17.40	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	758.290.000	552.831.750	72,91
4.2.17.43	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	241.376.200	221.678.500	91,84
4.2.17.52	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	186.439.000	138.801.800	74,45
4.2.17.55	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan Pendapatan Lain Lain	235.400.000	181.622.800	77,15
4.2.17.56	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	1.672.497.000	1.124.914.100	67,26
4.2.17.58	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	202.110.000	198.357.000	98,14
4.2.17.73	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	207.550.000	184.637.000	88,96
4.2.17.74	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	125.525.000	118.350.000	94,28
4.2.82	Program Reformasi Birokrasi	260.000.000	244.034.500	93,86
4.2.82.02	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	260.000.000	244.034.500	93,86
4.2.85	Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	137.400.000	132.195.000	96,21
4.2.84.03	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	137.400.000	132.195.000	96,21

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



PERFORMANCE REPORT
LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Bappenda Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Business* Bappenda Provinsi NTB sebagaimana visi, **Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah Yang Kuat dan Amanah** dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian =	Realisasi	X 100%
	Target	

Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

No	Nilai	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	Sangat Baik
2	60 – 79,9	Baik	Baik
3	50 – 59,9	Sedang	Sedang
4	5,0 – 49,9	Kurang	Kurang
5	$\leq 4,9$	Buruk/Invalid	Invalid

Sumber : Aplikasi e-Sakip



Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikutin indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Bappenda telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIK

Tabel 3.1

Tabel komparasi capaian kinerja Tahun 2017 dan 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017				Tahun 2018			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capkin (%)	Kriteria	Target (%)	Realisasi (%)	Capkin (%)	Kriteria
	Pertumbuhan PAD	%	5,19	23,87	459,92	Sangat Baik	7,64	-1,43	(18,78)	Invalid
1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	%	44,56	45,54	102,20	Sangat Baik	45,42	47,06	103,61	Sangat Baik
2	Jumlah Penerimaan PAD	Milyar Rupiah	1.641,69	1654,96	100,81	Sangat Baik	1.767,75	1.660,42	93,93	Sangat Baik
3	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	%	62,50	50,16	80,26	Sangat Baik	62,37	48,03	77,01	Baik
4	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	WP	1.472.548	1.408.732	95,67	Sangat Baik	1.686.707	1.657.493	98,27	Sangat Baik
5	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	%	100	51,11	51,11	Sedang	100	88,46	88,46	Sangat Baik
6	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rupiah	24,69	23,21	94,01	Sangat Baik	59,49	21,06	35,39	Kurang
7	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rupiah	3.342,73	3.268,93	97,79	Sangat Baik	3.332,31	3.212,39	96,40	Sangat Baik
8	Jumlah Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar Rupiah	472,55	480,59	101,70	Sangat Baik	415,02	369,46	89,02	Sangat Baik
9	Indeks Kepuasan Masyarakat rerata nilai per sentra layanan	%	80,00	75,45	94,31	Sangat Baik	82,50	77,02	93,36	Sangat Baik
10	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	%	37,50	49,84	132,91	Sangat Baik	37,63	51,97	138,11	Sangat Baik
11	Jumlah Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Kali	1.128	1.122	99,47	Sangat Baik	1.017	989	97,25	Sangat Baik
12	Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM ber kriteria "Sangat Baik"	Unit	9	1	11,11	Kurang	10	2	20,00	Kurang
13	Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP"	Dokumen	1	1	100,00	Sangat Baik	1	1	100,00	Sangat Baik
14	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	Sentra	1	1	100,00	Sangat Baik	2	2	100,00	Sangat Baik
15	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja	Rasio	110	103	93,64	Sangat Baik	110	105	95,45	Sangat Baik
16	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan teknis substantif	Orang	101	92	91,09	Sangat Baik	119	110	92,44	Sangat Baik
17	Tingkat keanndalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	%	97,90	97,83	99,93	Sangat Baik	98,30	98,03	99,72	Sangat Baik



Implementasi Rencana Strategik Bappenda Provinsi NTB yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2018 mencakup 1 sasaran strategis RPJMD dengan 1 indikator kinerja utama, dan 5 sasaran dengan 17 indikator sasaran. Dari penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik. Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2018 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. 14 (empatbelas) sasaran berhasil dicapai dengan nilai lebih dari 80% (Sangat Baik)
2. 1 (satu) sasaran berhasil dicapai dengan nilai 60,00 – 79,90% (Baik)
3. 2 (dua) sasaran dicapai dengan nilai 50 – 59,90% (Kurang)
4. 1 (satu) sasaran tidak berhasil dicapai dengan nilai < 49,9% (Invalid)

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIK

Bappenda Provinsi NTB dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang kuat dan amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bappenda Tahun 2013 – 2018, yang telah direvisi pada Februari 2017.

Dalam pelaksanaannya, Bappenda Provinsi NTB memiliki 17 (tujuhbelas) indikator sasaran, untuk lebih lanjut dapat dijelaskan pada uraian berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran I

Sasaran IKU : Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah; dan
Sasaran I : Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Capkin 2018 (%)	Capkin 2017 (%)
			Target	Target		
	Pertumbuhan PAD	%	7,64	-1,43	-18,78	459,92
1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	%	45,42	47,06	103,61	102,20
2	Jumlah Penerimaan PAD	Milyar Rupiah	1.767,75	1.660,42	93,93	100,81
3	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	%	62,37	48,03	77,01	80,26
4	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	WP	1.686.707	1.657.493	98,27	95,67

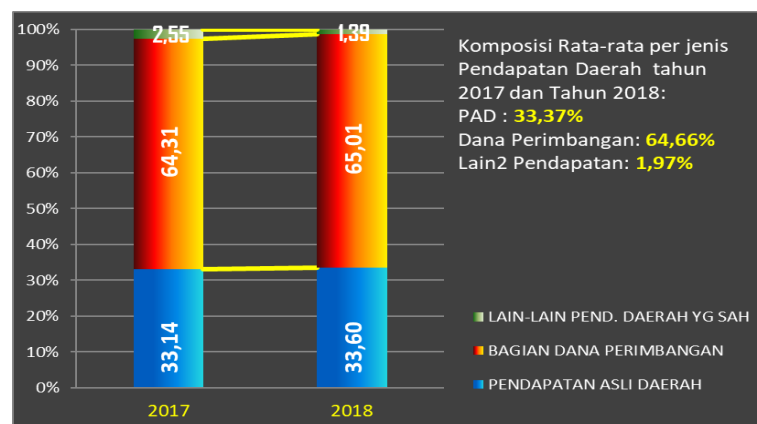


□ Pertumbuhan PAD Tahun 2017 – 2018

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018

No	Uraian	Tahun 2018 (Milyar Rupiah)				Tahun 2017 (Milyar Rupiah)			
		Target	Realisasi	%	Pert PAD	Target	Realisasi	%	Pert PAD
1	PENDAPATAN DAERAH	5.360,50	4.941,25	92,18	-2,79	5.121,40	5.083,15	99,25	28,69
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.767,75	1.660,42	93,93	-1,43	1.641,69	1.684,46	102,61	23,87
1.1.1	Pajak Daerah	1.293,24	1.269,69	98,18		1.144,45	1.180,80	103,18	
1.1.2	Retribusi Daerah	59,49	21,27	35,76		24,69	23,08	93,53	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	62,30	60,08	96,43		166,2	163,85	98,59	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	352,72	309,38	87,71		306,35	316,73	103,39	
1.2	Dana Perimbangan	3.332,31	3.212,39	96,40	-1,73	3.342,73	3.268,93	97,79	26,55
1.2.1	DBH Pajak/Bukan Pajak	325,95	261,64	80,27		367,53	346,52	94,28	
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	1.537,78	1.537,78	100,00		1.537,78	1.537,78	100	
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	1.468,58	1.412,97	96,21		1.437,42	1.384,63	96,33	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	260,45	68,44	26,28	-47,25	136,98	129,76	94,73	1.722,47

Pendapatan daerah tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp 4.941.246.974.629,00 atau 92,18% dari target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2018 yang diproyeksi sebesar Rp 5.360.502.949.869,00. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp. 1.660.417.707.373,00 Dana perimbangan sebesar Rp 3.212.386.689.010,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp. 68.442.578.246,00. Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat dalam diagram *clustered column* sebagai berikut:



Gambar 3.1. Diagram Clustered Column kontribusi per jenis komponen pendapatan daerah tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 sebesar Rp.1.684.468.709.593,00 sedangkan tahun 2018 tercapai sebesar Rp. 1.660.417.707.372,53 terjadi penurunan sebesar Rp. (24.051.002.221,00) atau sebesar -1,43% terhadap tahun 2017. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,64% sehingga capaian kinerjanya itu sebesar $-1,43/7,64 \times 100 = -18,78\%$ dengan kategori **Invalid**

$$\text{Formula : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah 2018} - \text{Pendapatan Asli Daerah 2017}}{\text{Pendapatan Asli Daerah 2017}} \times 100\%$$



Penyebab utama keadaan ini adalah beberapa sumber penerimaan pendapatan menurun yang disebabkan antara lain:

1. Tahun 2018 ini merupakan masa transisi pemerintahan dan adanya pengalihan guru-guru SMU menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi yang menyebabkan timbulnya belanja, namun tidak diikuti dengan penambahan penerimaan;
2. PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebagai salah satu sumber penerimaan telah dibubarkan sehingga tidak ada pemasukan, dan pada perubahan target pendapatan nilai nominalnya dihilangkan;
3. Pada komponen Retribusi Jasa Usaha, khususnya pada pemakaian kekayaan daerah yang ditargetkan meningkat namun pada kenyataannya hanya mampu direalisasikan kurang dari 25 persen;
4. Keberadaan hibah daerah sebagai recovery pasca bencana gempa bumi yang melanda P. Lombok pada Agustus dan September 2018, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat/daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, yang berada pada Lain-lain Pendapatan Daerah belum bisa digunakan dan dicairkan, sehingga progress anggaran juga tidak seperti target yang ditetapkan.

□ Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 yaitu sebesar Rp, 4.941.246.974.629,00 dikurangi dana DAK Tahun 2018 sebesar Rp, 1.412.965.949.375,00 menjadi sebesar Rp, 3.528.281.025.254,00, sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 yaitu Rp, 1.660.417.707.372,53 dengan demikian Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah (diluar dana DAK) terealisasi sebesar 47,06% dari Target sebesar 45,42%: Capaiannya terhadap target yaitu = $47,06/45,42 \times 100\%$ sebesar 103,61% dengan kategori **Sangat Baik**

$$\text{Formula : } \frac{\sum \text{Pendapatan Asli Daerah (tahun N)}}{\sum \text{Pendapatan Daerah} - \sum \text{DAK (tahun N)}} \times 100\%$$

$$\text{Formula : } \frac{1.660.417.707.372,53}{4.941.246.974.629,00 - 1.412.965.949.375,00} \times 100\% = 47,06\%$$

□ Jumlah Penerimaan PAD

Proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.767.746.421.040,00. Berkat ikhtiar seluruh jajaran Bappenda Provinsi NTB akhirnya PAD dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.660.300.469.938,00 dengan capaian 93.92% dengan kriteria **Sangat Baik**



□ **Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya**

Jumlah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar dalam sistem database sebanyak 1.553.181 (WP), namun tingkat kepatuhan dalam melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya masih tergolong rendah. Sampai dengan 31 Desember 2018 tercatat wajib pajak yang melakukan registrasi ulang sebanyak 746.056 (tidak termasuk kendaraan baru). $746.056 / 1.553.181 \times 100\% = 48,03\%$, sedangkan target yang ditentukan 62,37% atau 968.719 kbm. Sehingga capaiannya: $48,03 / 62,37 \times 100\% = 77,01\%$, lebih rendah ketimbang capaian tahun sebelumnya (80,26%) dengan kriteria **Baik**.

Tabel 3.4

Jumlah kendaraan bermotor menurut kabupaten/kota dan potensi Wajib Pajak yang melakukan Daftar Ulang obyek kendaraan bermotornya sampai 31 Desember 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KENDARAAN s/d 2017			JUMLAH WP MELAKUKAN DAFTAR ULANG			JML TMDU
		RODA DUA	RODA EMPAT	JUMLAH	RODA DUA	RODA EMPAT	JUMLAH	
1	KOTA MATARAM	303.793	63.892	367.685	146.959	43.787	190.746	176.939
2	LOMBOK BARAT	192.168	19.720	211.888	22.595	2.398	24.993	186.895
3	LOMBOK UTARA	55.708	4.460	60.168	96.076	12.359	108.435	(48.267)
4	LOMBOK TENGAH	225.262	21.173	246.435	26.100	2.880	28.980	217.455
5	LOMBOK TIMUR	281.452	23.378	304.830	21.822	4.081	25.903	278.927
6	SUMBAWA	105.086	34.592	139.678	135.601	13.907	149.508	(9.830)
7	SUMBAWA BARAT	44.278	4.329	48.607	55.102	6.674	61.776	(13.169)
8	DOMPU	44.236	4.522	48.758	96.964	12.964	109.928	(61.170)
9	BIMA	64.127	6.518	70.645	15.720	2.722	18.442	52.203
10	KOTA BIMA	41.735	12.752	54.487	23.364	3.981	27.345	27.142
TOTAL		1.357.845	195.336	1.553.181	640.303	105.753	746.056	807.125

□ **Data Potensi Wajib Pajak yang divalidasi**

Jumlah data wajib pajak kendaraan bermotor yang divalidasi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.686.707 kbm yang dilayani oleh 63 sentra layanan yang ada di 10 Kab/Kota se- NTB, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Banyaknya kendaraan bermotor tercatat menurut kabupaten/kota dan jenis kendaraan sampai dengan 31 Desember 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	MOBIL	MOBIL BARANG	BUS	SEPEDA MOTOR	JUMLAH
1	KOTA MATARAM	46.435	19.046	596	320.193	386.270
2	LOMBOK BARAT	11.909	7.948	93	196.888	216.838
3	LOMBOK UTARA	3.024	2.146	72	70.181	75.423
4	LOMBOK TENGAH	10.454	10.980	39	230.923	252.396



NO	KABUPATEN/KOTA	MOBIL	MOBIL BARANG	BUS	SEPEDA MOTOR	JUMLAH
5	LOMBOK TIMUR	10.465	12.804	376	286.530	310.175
6	SUMBAWA	23.161	12.131	176	126.415	161.883
7	SUMBAWA BARAT	1.983	2.549	401	53.139	58.072
8	DOMPU	2.998	2.368	246	59.234	64.846
9	BIMA	2.930	3.615	173	66.603	73.321
10	KOTA BIMA	6.410	6.197	400	45.262	58.269
TOTAL		119.769	79.784	2.572	1.455.368	1.657.493
PERSENTASE		7,2%	4,8%	0,2%	87,8%	

Data potensi wajib pajak diproyeksi sebanyak 1.686.707 kbm, dapat direalisasikan sebanyak 1.657.493 kbm, didapatkan capaian kinerja 98,27%. Capaian ini lebih tinggi 2,60% dibanding capaian tahun 2017 yang lalu sebesar 95,67%. Dengan demikian diperoleh kategori **Sangat Baik**.

Tabel 3.6

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2: Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Capkin 2017 (%)
5	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	%	100	88,46	88,46	51,11
6	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rupiah	59,49	21,27	35,76	94,01
7	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rupiah	3.332,31	3.212,39	96,40	97,79
8	Jumlah Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar Rupiah	415,02	369,46	89,02	101,70

- **Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya.**

Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Rekonsiliasi Data Retribusinya terbagi dalam beberapa kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7

Jumlah OPD Penghasil Kab/Kota/Provinsi yang melaksanakan Rekonsiliasi Data Retribusinya tahun 2018

No	Kegiatan	Target OPD	Realisasi OPD
1	Rapat Identifikasi Potensi Retribusi	45	35
2	Rapat Teknis Peningkatan kapasitas Pengelolaan PBB Migas	45	40
3	Rekonsiliasi PNBPN & Dana Perimbangan	45	42
4	Rakortek data IUP PNBPN	45	38
5	Rekonsiliasi pendapatan BLUD	45	41



No	Kegiatan	Target OPD	Realisasi OPD
6	Rapat Pembahasan Perubahan Target	45	45
7	Rakor Lifting Migas	45	34
8	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil (peserta)	45	43
	JUMLAH	360	318,44
	Rata-Rata Capaian		39,81
	Target Renstra OPD		45,00

Dengan demikian maka realisasi Prosentase Jumlah OPD Penghasil Kabupaten/ Kota/Provinsi yang melaksanakan Rekonsiliasi Data Retribusinya yaitu sebesar 88,46% dimana pada tahun 2018 ditargetkan rata-rata sebanyak 45 OPD (100%), namun hanya dapat direalisasikan sejumlah 39,81 OPD, maka Capaian Kinerjanya yaitu $39,81/45 \times 100\% = 88,46\%$, dibandingkan dengan tahun 2017 capaiannya jauh lebih tinggi yakni 56,25% dengan kriteria **Sangat Baik**.

□ Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah

Pada Tabel 3.1.2 Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018, dapat dilihat salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yakni Retribusi Daerah diproyeksi untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.33.294.000.000,00. Namun pada pertengahan tahun 2018 dilaksanakan kebijakan perubahan target pendapatan menjadi Rp. 59.486.665.000,00 Ikhtiar bersama seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi NTB akhirnya Penerimaan Retribusi Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.271.223.932,00 dengan capaian 35,76% dengan kriteria **Kurang Baik**

□ Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan

Pada Tabel 3.1.2 Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018, dapat dilihat salah satu komponen Pendapatan Daerah yakni Bagian Dana Perimbangan Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 3.332.310.529.184,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.212.386.689.010,00 dengan capaian 96,40% dengan kriteria **Sangat Baik**

□ Jumlah Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah

Pada Tabel 3.1.2 Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018, dapat dilihat komponen Pendapatan Asli Daerah yang bukan merupakan Pajak dan Retribusi yakni Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 415.021.513.468,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 369.457.813.365,00 dengan capaian 89,02% dengan kriteria **Sangat Baik**.



Tabel 3.8

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Capkin Tahun Lalu
9	Indeks Kepuasan Masyarakat rerata nilai per sentra layanan	%	82,50	77,02	93,36	94,31
10	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	%	37,63	51,97	138,11	132,91
11	Jumlah Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Kali	1.017	989	97,25	99,47
12	Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM ber kriteria "Sangat Baik"	Unit	10	2	20,00	11,11

□ Indeks Kepuasan Masyarakat rerata nilai per sentra layanan

Untuk mengukur kinerja aparatur pada Bappenda Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

No	Kode	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNIT										
			MATARAM	GERUNG	TANJUNG	PRAJA	SELONG	SUMBAWA	TALIWANG	DOMPU	RABA	PANDA	
1	U1	Keramahan kesopanan dan sikap dalam pelayanan	3.063	3.273	3.256	3.230	3.256	2.271	3.147	3.000	2.567	3.393	NILAI KESELURUHAN
2	U2	Rerpon/kecepatan dalam pelayanan	2.825	3.180	3.244	3.250	3.244	2.217	3.207	3.000	2.600	3.573	
3	U3	Prosedur pelayanan	3.329	3.020	3.072	3.460	3.072	2.343	2.807	2.811	2.673	3.440	
4	U4	Persyaratan pelayanan	2.755	2.700	2.667	3.220	3.667	2.357	2.680	2.649	2.720	3.367	
5	U5	Kenyamanan pelayanan	2.986	3.260	3.278	3.200	3.278	2.662	3.253	3.054	2.893	3.367	
6	U6	Kejelasan petugas pelayanan	3.231	3.327	3.389	3.150	3.389	2.705	3.047	3.252	2.760	3.380	
7	U7	Kedisiplinan petugas pelayanan	3.196	2.420	2.317	3.290	2.317	2.536	2.787	2.441	2.640	3.333	
8	U8	Tanggung jawab petugas pelayanan	3.175	2.913	2.928	3.210	2.928	2.739	2.853	2.622	2.913	3.407	
9	U9	Kemampuan petugas pelayanan	3.238	3.287	3.261	3.200	3.261	2.551	3.180	3.027	2.900	3.347	
10	U10	Keadilan mendapatkan pelayanan	2.657	3.187	3.250	3.210	3.250	2.585	3.200	2.982	2.927	3.567	
11	U11	Kewajaran biaya pelayanan	2.287	2.587	2.194	3.250	2.194	2.609	2.853	2.378	2.747	3.309	
12	U12	Kepastian biaya pelayanan	2.301	2.053	1.883	3.180	1.883	2.633	2.767	1.910	2.473	3.280	
13	U13	Kepastian jadwal pelayanan	3.077	2.500	1.911	3.150	1.911	2.546	2.440	1.937	2.733	3.347	
14	U14	Keamanan lingkungan pelayanan	3.336	3.127	3.200	3.730	3.200	2.304	3.273	2.982	3.207	3.393	
NILAI (%)			79,91	72,48	70,99	83,12	80,83	74,48	76,85	67,53	89,41	74,6	77,02
KATEGORI			B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	B



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rerata nilai indeks yang diperoleh pada 10 UPTB-UPPD Kab/kota sebesar 77,02 dengan nilai Indeks B (Baik), sedangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ditargetkan sebesar 82,50%, maka capaian kerjanya $77,02 / 82,50 \times 100 = 93,36\%$, lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebesar 94,31%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

□ **Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya**

Obyek PKB adalah kendaraan bermotor, yang jumlahnya merupakan variabel utama yang menentukan potensi penerimaan PKB. Jumlah kendaraan bermotor berubah-ubah, tergantung pada pola penambahan kendaraan bermotor (khususnya dari kendaraan baru) dan pola pengurangan kendaraan bermotor (mutasi). Pada saat yang bersamaan, pola penambahan juga menjadi dasar penghitungan BBNKB, karena obyek BBNKB adalah pengalihan. Berbeda dengan PKB yang dipungut setiap tahun, BBNKB hanya dikenakan pada saat pengalihan. Dengan demikian, jumlah kendaraan bermotor yang menentukan berapa potensi penerimaan PKB. Namun besar kecil penerimaan pendapatan tersebut dipengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang krusial di NTB karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak khususnya PKB dan BBNKB.

Tabel 3.10

Jumlah Wajib Pajak yang melakukan Daftar Ulang Kendaraan Bermotornya

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KENDARAAN			JML WP YANG DU			JML TMDU
		RODA DUA	RODA EMPAT	JUMLAH	RODA DUA	RODA EMPAT	JUMLAH	
1	KOTA MATARAM	303.793	63.892	367.685	146.959	43.787	190.746	176.939
2	LOMBOK BARAT	192.168	19.720	211.888	22.595	2.398	24.993	186.895
3	LOMBOK UTARA	55.708	4.460	60.168	96.076	12.359	108.435	(48.267)
4	LOMBOK TENGAH	225.262	21.173	246.435	26.100	2.880	28.980	217.455
5	LOMBOK TIMUR	281.452	23.378	304.830	21.822	4.081	25.903	278.927
6	SUMBAWA	105.086	34.592	139.678	135.601	13.907	149.508	(9.830)
7	SUMBAWA BARAT	44.278	4.329	48.607	55.102	6.674	61.776	(13.169)
8	DOMPU	44.236	4.522	48.758	96.964	12.964	109.928	(61.170)
9	BIMA	64.127	6.518	70.645	15.720	2.722	18.442	52.203
10	KOTA BIMA	41.735	12.752	54.487	23.364	3.981	27.345	27.142
TOTAL		1.357.845	195.336	1.553.181	640.303	105.753	746.056	807.125

Dari tabel diatas terlihat, total Waib Pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya selaku penguasa dan atau pemilik kendaraan bermotor sebanyak 746.056 WP sedangkan sisanya sebanyak 807.125 WP berkategori TMDU (Tidak melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya. Tahun 2018 ditargetkan turun sebesar 37,63%



namun realisasinya 51,97%, ini mengindikasikan bahwa kesadaran membayar PKB masih rendah dan berbanding terbalik dengan WP yang patuh. Artinya masih 51,97% pemilik kendaraan bermotor masih menunggak atau tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Capaian kinerjanya $37,63 / 51,97 * 100 = 138,11\%$ masih lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 132,91%, kriterianya **Sangat Baik**.

□ **Jumlah Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor**

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan rencana frekuensi Opgab sebanyak 1.017 kali, namun sampai akhir tahun terealisasi 989 kali, capaiannya 97,25% masih lebih rendah dibanding tahun 2017 sebesar 99,47%, kriterianya **Sangat Baik**.

□ **Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM ber kriteria "Sangat Baik"**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dimana baik/buruk mutu layanannya dikategorikan sebagai berikut:

A (Sangat Baik) – dengan nilai indeks antara 81,26 s/d 100; B (Baik) dengan nilai 62,51 s/d 81,25; C (Kurang Baik) nilai 43,76 s/d 62,50; dan D (Tidak Baik) dengan nilai 25,00 s/d 43,75.

Tabel 3.11

Jumlah Sentra pelayanan yang memperoleh penilaian dengan kriteria
IKM Sangat Bagus

UPTB / UPPD	NILAI IKM	KRITERIA
Mataram	79,91	Baik [B]
Lobar	72,48	Baik [B]
Lomut	70,99	Baik [B]
Loteng	83,12	Sangat Baik [A]
Lotim	80,83	Baik [B]
Sumbawa	74,48	Baik [B]
Sbw Barat	76,85	Baik [B]
Dompu	67,53	Baik [B]
Panda-Bima	89,41	Sangat Baik [A]
Raba-Bima	74,60	Baik [B]
UPTB Ber_IKM "Sangat Baik"		2
BAPPENDA	77,02	Baik [B]

Hasil survei yang dilakukan di masing-masing UPTB-UPPD di Kab/Kota se-NTB menunjukkan hanya 2 sentra layanan yang memperoleh kriteria IKM "Sangat Baik" yakni UPTB Praya Kab. Lombok Tengah dan UPTB Panda Kab. Bima, sedangkan 8 UPTB lainnya memperoleh nilai B artinya Baik. Ditargetkan 10 UPTB memiliki indeks berkategori sangat baik, namun terealisasi 2 UPTB, dengan capaian 20%, dengan kriteria **kurang baik**.



Tabel 3.12

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Capkin Tahun Lalu
13	Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP"	Dokumen	1	1	100,00	100,00
14	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	Sentra	2	2	100,00	100,00
15	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja	Rasio	1 : 110	1 : 105	95,14	93,64
16	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan teknis substantif	Orang	119	110	92,44	91,09

□ Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP"

Adapun Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Aset BMD yang mendukung opini WTP sebanyak 1 dokumen berhasil direalisasikan 100%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

□ Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO

Sampai tahun 2018, diantra 10 sentra layanan UPTB UPPD telah direalisasi dua unit yang telah disertifikasi yakni Samsat Mataram dan Samsat Praya, dari target yang ditetapkan sebanyak dua unit dapat terealisasi 100%, kriterianya **Sangat Baik**.





- Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja

Jumlah wajib pajak yang terealisasi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.553.181 kbm tidak termasuk kendaraan baru, yang dilayani oleh 63 sentra layanan yang ada. Dari 63 sentra layanan, hanya 53 sentra yang beroperasi mulai awal tahun sedangkan 10 unit sentra layanan berupa Mobil Samsat Keliling baru didatangkan menjelang akhir tahun 2018, sehingga belum bisa beroperasi penuh.

No,	Unit Pelayanan	Σ Sentra Pelayanan	Σ Hari Kerja dalam setahun
1.	Samsat Induk	1 Sentra	316 hari
2.	Samsat Bantuan (Corner, Gerai dan WeekEnd)	7 Sentra	285 hari
3.	Samsat Agent / UPPD	10 Sentra	329 hari
4.	Samsat Drive Thru	13 Sentra	265 hari
5.	Samsat Keliling	24 Sentra	242 hari
6.	Samsat Desa	6 Sentra	215 hari
7.	Samsat Pasar	2 Sentra	298 hari
	Jumlah	63 Sentra	
	Rata-rata pelayanan/tahun		279 hari

Realisasi Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1.533.181 kbm yang dilayani oleh 53 sentra pelayanan selama rata-rata 279 hari dalam setahun sehingga Prosentasi rerata cakupan layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

Σ Realisasi kbm tahun 20xx	1.553.181	29.305	kbm / tahun
Σ Sentra Layanan	53		
Σ Realisasi kbm / tahun	29.305	105	unit kbm / hari
Σ Rata2 hari layanan dlm setahun	279		

Dengan perhitungan diatas dapat diartikan bahwa rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja tahun anggaran 2018 adalah 1 sentra pelayanan dapat melayani 105 wajib pajak/hari, sedangkan targetnya adalah 1:110 sehingga capaian kinerjanya adalah $105/110 \times 100\% = 95,4\%$ dengan kategori **Sangat Baik**.

- Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif
- Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan Teknis Substantif

No,	Nama Pendidikan Teknis Substantif	Jumlah Peserta (Orang)	
		2017	2018
1	Workshop Alih Teknologi Kesamsatan	25	10
2	Bintek In House Training	25	15
3	Bintek Proses Bisnis Samsat	20	22
4	Bintek Juru Sita Pajak	25	20
5	Bintek peningkatan kapasitas pengelolaan PBB Migas	45	18
6	Bintek Penyusunan Data Potensi PAD	35	25
	Jumlah Tahun	175	110



Perhitungan

Jumlah Aparatur yang telah ikut Diklat/Bintek sebanyak 110 orang, dibagi jumlah pegawai dalam 1 tahun dengan jumlah Total Pegawai Bappenda per 31 Desember 2018 sebanyak 339 orang. Hasilnya $110 / 339 \times 100 = 32,45\%$, sedangkan target ditentukan sebanyak 119 orang, sehingga capaiannya sebagai berikut: $110 / 119 \times 100 = 92.44\%$, lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 91,09%, kriterianya **Sangat Baik**.

Tabel 3.15

Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

Sasaran 5: Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan Inovasi layanan pendapatan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Capkin Tahun Lalu
17	Tingkat Keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	%	98,30	98,03	99,72	99,93

□ Tingkat Keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi

Sistem informasi berbasis komputer memainkan peranan penting dan makin luas dalam bisnis teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis, meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis pengelolaan pendapatan daerah, pengambilan keputusan pimpinan, dan kerjasama kelompok hingga dapat mempercepat pencapaian tujuan yang termaktub dalam dokumen Rencana Strategis Bappenda. Guna memperkuat keandalan sistem jaringan dalam proses pelayanan kesamsatan pada seluruh sentra layanan, baik yang statik maupun mobile maka tingkat gangguan harus dieliminir sekecil mungkin.

Untuk itulah, jajaran Bappenda dibawah Subbidang Teknologi Informasi Pendapatan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan – Bappenda harus memastikan setiap sentra layanan yang mengalami gangguan sistem jaringan maupun perangkat keras yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan pendapatan.

	KABUPATEN / KOTA	JML Sentra	GANGGUAN (Jam)		TOTAL
			SYSTEM NET	SOFTWR	
1	KOTA MATARAM	12	145	2	147
2	KAB. LOMBOK BARAT	6	48	8	56
3	KAB. LOMBOK UTARA	3	144	11	155
4	KAB. LOMBOK TENGAH	6	120	7	127
5	KAB. LOMBOK TIMUR	11	264	10	274
6	KAB. SUMBAWA	6	72	6	78
7	KAB. SUMBAWA BARAT	4	168	4	172
8	KAB. DOMPU	4	96	9	105



KABUPATEN / KOTA		JML Sentra	GANGGUAN (Jam)		TOTAL
			SYSTEM NET	SOFTWR	
9	KAB. BIMA	5	192	12	204
10	KOTA BIMA	3	120	3	123
11	INDUK	3	24	0	24
JUMLAH		63	1.393	72	1.465

Total jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun : 1.465 jam; Total jam pelayanan seluruh titik pelayanan yaitu : 135,360 jam. Prosentase jam gangguan seluruh titik pelayanan dalam setahun yaitu : $1.465 / 135,360 \times 100\% = 1,37\%$ atau dengan kehandalan $(100-1,37=98,03)$. Dengan adanya gangguan maka keandalan sistem akan berpengaruh, sehingga kinerja yang dicapai yaitu sebesar $98,03/98,30 \times 100\% = 99,72\%$, kriterianya **Sangat Baik**.

3.4 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN BERJALAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN 2018

No	Sasaran	No	Indikator	Realisasi s/d 2018	Target RPJMD 2018	Capkin 2018 terhadap RPJMD 2018
	Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan PAD (%)	-1,43	7,64	-18,78
1	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK (%)	47,06	45,42	103,61
		2	Jumlah Penerimaan PAD (Milyar Rupiah)	1.660,42	1.767,75	93,93
		3	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (%)	48,03	62,37	77,01
		4	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	1.657.493	1.686.707	98,27
2	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	5	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya (%)	88,46	100	88,46
		6	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah (Milyar Rupiah)	21,06	59,49	35,39
		7	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan (Milyar Rupiah)	3.212,39	3.332,31	96,40
		8	Jumlah Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah (Milyar Rupiah)	369,46	415,02	89,02
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	9	Indeks Kepuasan Masyarakat rerata nilai per sentra layanan (%)	77,02	82,50	93,36
		10	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang)	51,97	37,63	138,11



No	Sasaran	No	Indikator	Realisasi s/d 2018	Target RPJMD 2018	Capkin 2018 terhadap RPJMD 2018
			kendaraan bermotornya (%)			
		11	Jumlah Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor (kali)	989	1.017	97,25
		12	Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM ber kriteria "Sangat Baik" (Sentra)	2	10	20,00
4	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	13	Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP"	1	1	100,00
		14	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	2	2	100,00
		15	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja	105	110	95,45
		16	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif (Orang)	110	119	92,44
5	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan Inovasi layanan pendapatan daerah;	17	Tingkat Keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (%)	98,03	98,30	99,72

Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2018 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (2018).

SASARAN (JENIS PENDAPATAN)	REALISASI TAHUN 2018	PROYEKSI TH 2018 DLM RPJMD	CAPAIAN REALISASI 2018 DGN PROYEKSI RPJMD TH 2018	CAPAIAN REALISASI 2018 DGN PROYEKSI RPJMD TH 2018	PROYEKSI TH 2018 (TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	4.941.246.974.629	5.230.285.800.854	94,47	92,18	5.360.502.949.869
Pendapatan Asli Daerah	1.660.417.707.373	1.719.188.366.054	96,58	93,93	1.767.746.421.040
Dana Perimbangan	3.212.386.689.010	3.281.371.416.400	97,90	96,40	3.332.310.529.184
Lain-lain Pendapatan yang Sah	68.442.578.246	229.726.018.400	29,79	26,28	260.445.999.645

Realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 telah mencapai 94,47% dari proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, dan 92,18% dari proyeksi Rancangan awal RPJMD Tahun 2018-2023.

Begitu pula dengan rincian pendapatan daerah yang juga diproyeksikan dalam RPJMD tersebut, realisasi PAD tahun 2018 telah mencapai 93,93% dari proyeksi PAD tahun 2018 dalam RPJMD, berarti terlampaui sebesar Rp. 107.328.713.667,00



Pertumbuhan PAD tahun 2018 dalam RPJMD diproyeksikan sebesar 7,64%, terealisasi sebesar -1,43%, artinya terjadi kontraksi negative sebesar 18,87% dari target yang ditetapkan. Hal ini terjadi sebagai akibat tidak tercapainya target Retribusi Daerah yang hanya mampu terealisasi 35,39% dan Lain-lain PAD yang Sah hanya mampu menyumbangkan 87,71%. Demikian pula dengan komponen Dana Perimbangan juga berkontraksi sebesar 1,73% sebagai pelengkap tidak tercapainya target Pertumbuhan PAD tahun 2018.

3.5 REALISASI ANGGARAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN BELANJA		REALISASI KEUANGAN	
		PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.360.643.650	16.343.093.470	15.674.651.128	95,91
4.2.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	112.832.000	114.272.000	106.324.303	93,04
4.2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.791.388.040	2.770.314.200	2.511.729.470	90,67
4.2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	634.724.000	636.564.000	631.343.000	99,18
4.2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.236.673.160	2.545.750.000	2.540.471.280	99,79
4.2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	777.617.570	852.323.570	815.817.695	95,72
4.2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.534.029.500	1.157.580.000	1.049.420.956	90,66
4.2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	92.734.400	103.034.400	100.771.400	97,80
4.2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.504.918.000	5.069.718.300	4.860.801.900	95,88
4.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	85.412.000	90.822.000	83.972.500	92,46
4.2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	465.400.000	585.500.000	579.609.093	98,99
4.2.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	454.928.700	599.425.000	582.350.950	97,15
4.2.01.19	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	455.800.000	455.800.000	454.400.000	99,69
4.2.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	1.214.186.280	1.361.990.000	1.357.638.581	99,68
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.334.612.000	12.248.711.490	11.734.072.777	95,80
4.2.02.03	Pembangunan gedung kantor	5.138.484.000	4.150.729.000	4.057.797.729	97,76
4.2.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.528.980.000	2.578.680.000	2.510.785.000	97,37
4.2.02.10	Pengadaan meubelair	533.950.000	832.469.000	765.881.300	92,00
4.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	399.032.000	480.432.000	460.013.118	95,75
4.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.573.634.000	1.549.680.000	1.341.106.495	86,54



KODE	URAIAN	ANGGARAN BELANJA		REALISASI KEUANGAN	
		PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
4.2.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	238.032.000	244.032.000	228.588.900	93,67
4.2.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	277.400.000	288.036.460	277.354.000	96,29
4.2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	645.100.000	2.124.653.030	2.092.546.235	98,49
4.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	388.728.500	391.428.500	321.004.188	82,01
4.2.04.01	Pendidikan dan pelatihan formal	198.762.500	198.762.500	146.678.188	73,80
4.2.04.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	189.966.000	192.666.000	174.326.000	90,48
4.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	885.807.000	1.011.285.000	954.406.796	94,38
4.2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	250.010.000	303.760.000	292.108.000	96,16
4.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	156.832.000	192.200.000	186.082.700	96,82
4.2.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	478.965.000	515.325.000	476.216.096	92,41
4.2.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	307.415.000	305.145.000	294.753.500	96,59
4.2.07.01	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	307.415.000	305.145.000	294.753.500	96,59
4.2.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.387.511.850	19.328.854.540	17.020.881.082	88,06
4.2.17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah	562.681.500	645.236.500	482.612.600	74,80
4.2.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	6.282.101.760	6.555.386.340	5.783.296.116	88,22
4.2.17.31	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	952.327.500	1.079.327.500	1.054.997.095	97,75
4.2.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	2.569.375.000	2.666.985.000	2.593.570.000	97,25
4.2.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.901.228.500	1.518.313.500	1.411.154.000	92,94
4.2.17.34	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	331.997.500	377.843.500	260.455.100	68,93
4.2.17.35	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	517.415.440	628.000.000	555.957.792	88,53
4.2.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	667.977.450	971.840.000	912.760.429	93,92



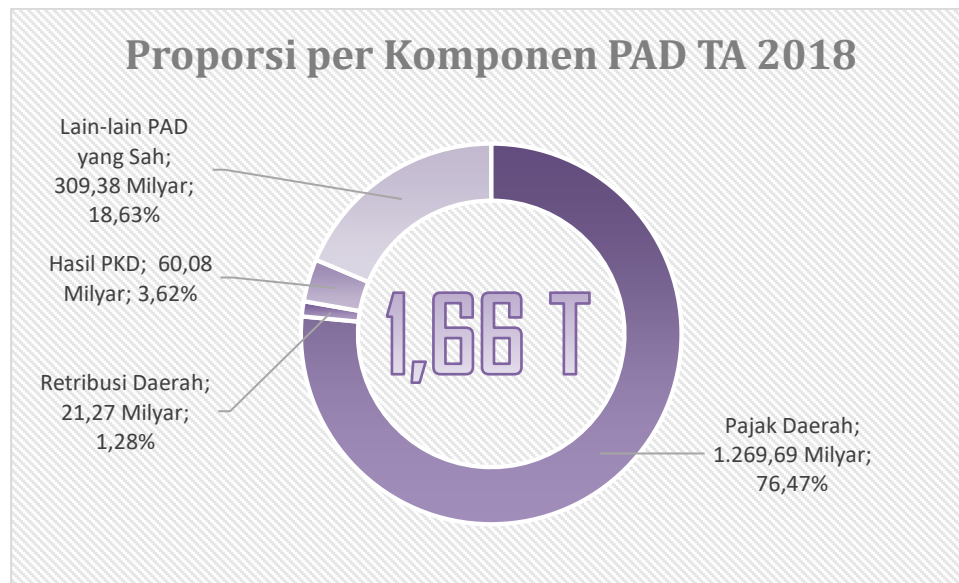
KODE	URAIAN	ANGGARAN BELANJA		REALISASI KEUANGAN	
		PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	%
4.2.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	1.727.807.500	1.256.735.000	1.244.885.000	99,06
4.2.17.40	Konsultasi dan Monitoring	545.390.000	758.290.000	552.831.750	72,91
4.2.17.43	Penerimaan Dana Perimbangan	230.713.700	241.376.200	221.678.500	91,84
4.2.17.52	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	176.439.000	186.439.000	138.801.800	74,45
4.2.17.52	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	235.650.000	235.400.000	181.622.800	77,15
4.2.17.55	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	1.281.097.000	1.672.497.000	1.124.914.100	67,26
4.2.17.56	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	122.110.000	202.110.000	198.357.000	98,14
4.2.17.58	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	181.750.000	207.550.000	184.637.000	88,96
4.2.17.73	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	101.450.000	125.525.000	118.350.000	94,28
4.2.17.74	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan				
4.2.82	Program Reformasi Birokrasi	260.000.000	260.000.000	244.034.500	93,86
4.2.82.02	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	260.000.000	260.000.000	244.034.500	93,86
4.2.85	Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	107.400.000	137.400.000	132.195.000	96,21
4.2.84.03	Peningkatan Management Asset/ barang Daerah	107.400.000	137.400.000	132.195.000	96,21
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	50.545.606.270	54.612.778.039	53.809.898.817	98,53
	BELANJA LANGSUNG	46.032.118.000	50.025.918.000	46.375.998.971	92,70
	BELANJA	96.577.724.270	104.638.696.039	100.185.897.788	95,74

Pencapaian sasaran di atas, merupakan wujud nyata dari peningkatan kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi NTB dan seluruh jajarannya selaku pengelola pendapatan yang di dukung sarana dan prasarana yang baik, intensitas pengelolaan pendapatan daerah seluruh unsur yang terkait disertai dengan peningkatan koordinasi semua pihak.

Pencapaian kinerja keuangan tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 76,47%, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Retribusi daerah berada pada posisi terendah 1,28%. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 3,62% (dalam urutan ketiga) setelah



jenis komponen PAD yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua yaitu 18,63%.



3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bappenda Prov. NTB pada tahun 2018 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efesiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.

Pengukuran **efisiensi** dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efesiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria skala Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rasio Efisiensi	Kriteria
1	< 10%	sangat efisien
2	10%-20%	efisien
3	21%-30%	cukup efisien
4	31%-40%	kurang efisien
5	> 40%	tidak efisien



Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Bappenda Provinsi NTB semakin baik dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan penyusunan besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan digambarkan dalam tabel berikut ini.

URAIAN	Biaya Pemeroleh Pendapatan		Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Hasil Analisis Efisiensi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
a	b	c	d	e=c/d x 100	f
Total Anggaran Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung dan Total Realisasi Pendapatan Daerah	104.638.696.039	100.185.897.788	4.941.246.974.629	2,03	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Asli Daerah	104.638.696.039	100.185.897.788	1.660.417.707.373	6,03	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Pajak	104.638.696.039	100.185.897.788	1.269.688.670.076	7,89	Sangat Efisien

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Rasio efisiensi anggaran pendapatan Bappenda pada tahun 2018 sebesar 2,03% (Sangat Efisien).

Rasio efisiensi anggaran pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama tahun 2018 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,03% (Sangat Efisien) yang berarti Bappenda dinilai Sangat Efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah karena dengan teliti dan cermat telah memperhitungkan estimasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diproyeksikan, begitu pula Rasio efisiensi anggaran terhadap perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 7,89% (Sangat Efisien). Adapun Jenis Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dimaksud terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok serta adanya pemungutan denda pajak yang masuk kedalam komponen Lain-lain PAD yang Sah. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan outputnya baik rencana maupun realisasinya. Efektifitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Adapun standar pencapaian tingkat efesiensi dan efektifitas suatu kegiatan adalah sebagai berikut:



No	Rasio Efektivitas	Kriteria
1	< 75%	tidak efektif (Inefisien/Inefektif)
2	75%-89%	kurang efektif
3	90%-99%	cukup efektif
4	99,1% -100%	Efektif (sesuai harapan)
5	>100%	sangat efektif (Efisien/Efektif)

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin baik. Perhitungan efektivitas pendapatan pada table berikut ini :

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target	Realisasi	Rasio	Hasil Analisis
	(Rp.)	(Rp.)	Efektivitas (%)	Efektivitas
1. Pendapatan Asli Daerah	1.767.746.421.040	1.660.417.707.373	93,93	Cukup Efektif
Pajak Daerah	1.293.238.242.572	1.269.688.670.076	98,18	Cukup Efektif
Retribusi Daerah	59.486.665.000	21.271.223.932	35,76	Tidak Efektif
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	62.302.070.068	60.080.960.355,96	96,43	Cukup Efektif
Lain-Lain PAD yang Sah	352.719.443.400	309.376.853.008,57	87,71	Kurang Efektif
2. Dana Perimbangan	3.332.310.529.184	3.212.386.689.010	96,40	Cukup Efektif
3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	260.445.999.645	68.442.578.246	26,28	Tidak Efektif
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)	5.360.502.949.869	4.941.246.974.629	92,18	Cukup Efektif

Dari Tabel di atas diketahui, bahwa rasio efektivitas pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sebesar 92,18 % yang berarti Cukup Efektif atau sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena total prosentase realisasi anggaran Pendapatan Daerah berada pada rasio efektifitas antara 99,1% - 100% yang artinya efektif dalam pencapaian target anggaran pendapatan Daerah yang ditetapkan. Pendapatan daerah dimaksud terdiri atas Rasio efektifitas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) 93,99% (Cukup efektif), Dana Perimbangan 96,40% (Cukup efektif) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 26,28% (Tidak efektif).

3.7 DUKUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPENDA PROVINSI NTB TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NTB.

Bappenda Provinsi NTB ditetapkan sebagai pengelola utama dan berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB, sesuai amanah Permen PAN-RB No. Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur



NTB Nomor 060.1-748 Tahun 2014 tentang IKU Pemerintah dan SKPD Provinsi NTB, serta Keputusan Gubernur No. 912-409 tentang Penetapan SKPD Pengelola Utama dan Pendukung Indikator Kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sehingga sasaran pembangunan daerah saling terkait dan saling menunjang dalam ikhtiar pencapaian tujuan dan sasaran kerangka visi dan misi dari program Kepala Daerah.

Indikator utama yang menjadi tanggungjawab Bappenda Provinsi NTB adalah Pertumbuhan PAD, yang berada pada Misi ke-5 RPJMD yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah, dengan tujuan Meningkatkan sumber Pendanaan Daerah, yang sarannya antara lain: (a) Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat; (b) Tersedianya sistem pelayanan PAD; dan (c) Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya.

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menetapkan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK), pelaporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Tahun 2018			Keterangan
				Target	Realisasi	Deviasi Terhadap Target	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	27	13	19	Belum Tercapai
2	Penanganan Pelanggaran Perda dan Peraturan Gubernur	%	45	100	100	0	Tercapai
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	73,00	Tercapai	Tercapai	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	4,55	3,32	1,5	Belum Tercapai
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,61	6,25 – 6,50	6,03	0,095	Belum Tercapai
6	Pola Pangan Harapan	point	78,7	82,50	82	0,3	Belum Tercapai
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8.950	9.578	NA	NA	NA
8	Angka kemiskinan	%	17,25	12,25	15,05	2,8	Belum Tercapai
9	Laju Investasi	%	8,28	13,50	-3,07	-16,57	Belum Tercapai
10	Pertumbuhan PAD	%	13,66	7,64	-1,43	-9,07	Belum Tercapai
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1.357.602	4.000.000	3.508.903	-491.097	Belum Tercapai
	- Mancanegara	Org	565.944	2.000.000	1.430.249	-569.751	Belum Tercapai
	- Nusantara	Org	791.658	2.000.000	2.078.654	78.654	Tercapai
12	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPMKS)	%	1,58	2,42	3,76	1,34	Belum Tercapai
B	Aspek Pelayanan Umum						
C	Aspek Daya Saing						

Sumber: Bappenda Provinsi NTB (sangat sementara)

BAB IV

PENUTUP



PERFORMANCE REPORT
LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bappenda Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Bappenda Provinsi NTB. Dimasa mendatang Bappenda Provinsi NTB akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Bappenda Provinsi NTB sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai ikhtiar tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Bappenda Provinsi NTB.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Bappenda Provinsi NTB kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi NTB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERFORMANCE REPORT LAP. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2018**

- 1. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
- 2. Tugas : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Bappenda Provinsi NTB dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan (kewenangan Daerah).
- 3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / formula perhitungan
1	Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mengukur capaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan dibandingkan dengan penerimaan PAD Tahun sebelumnya. <u>Formulasi perhitungan:</u> Realisasi PAD Tahun ini dikurangi Realisasi PADTahun lalu, dibagi Realisasi PAD Tahun lalu dikali 100 persen. <u>Tipe Perhitungan Target</u> : Kualitatif <u>Sumber Data:</u> Laporan Realisasi Pendapatan dan hasil evaluasi kegiatan Bappenda, Renstra OPD 2013-2018, Laporan Tahunan BPKAD, Berita ekonomi statistik BPS NTB dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Mataram, 18 Februari 2018
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Majapahit No. 17 Telp. (0370) 631502 – 631724, Fax.: 641151
M A T A R A M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Iswandi, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,

2018

Pihak Kedua,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Ir. H. Iswandi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7,64 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 18.387.511.850	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 1 dan 2
2 Program Reformasi Birokrasi	Rp. 260.000.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 3
3 Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	Rp. 107.400.000	Sumber dana APBD, mendukung sasaran strategis nomor 3

Mataram, 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



[Signature]

Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI



[Signature]

Ir. H. Iswandi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2018**

No	Saaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Revisi
	Tercapainya penerimaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan PAD	7,64%	--
1	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	1	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	45,53%	45,42 %
		2	Jumlah Penerimaan PAD	1.719,19 Milyar Rp	1.767,75 Milyar Rp
		3	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	62,37%	--
		4	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	1.686.707 WP	--
2	Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah	5	Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya	100 %	--
		6	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	33,29 Milyar Rp	59,49 Milyar Rp
		7	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	3.281,37 Milyar Rp	3.332,31 Milyar Rp
		8	Jumlah Penerimaan diluar Pajak dan Retribusi Daerah	229,73 Milyar Rp	415,02 Milyar Rp
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	9	Indeks Kepuasan Masyarakat rerata nilai per sentra layanan	82,5%	--
		10	Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya	37,63%	--
		11	Jumlah Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	1.017 Kali	--
		12	Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM ber kriteria "Sangat Baik"	10 unit	--
4	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	13	Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP"	1 Laporan	--
		14	Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO	2 sentra	--
		15	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja	1:110	--
		16	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	35,0%	--
			Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan teknis substantif (Revisi)	--	119 Orang
5	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan Inovasi layanan pendapatan daerah;	17	Tingkat gangguan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi	1,7%	--
			Tingkat Keandalan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (Revisi)	--	98,30 %

Mataram , Juli 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Ir. H. Iswandi, M.Si.
NIP. 19651231 199403 1 153

CASCADING INDIKATOR KINERJA BAPPENDA TAHUN 2018

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
Tercapainya penerimaan pendapatan daerah;	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target: 7,64 %	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK Target: 45,43 %	Tercapainya Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB	Jumlah proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB Target: 713,44 Milyar rupiah	BIDANG PAJAK DAERAH	Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
	Jumlah Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Target: 5.346,19 Milyar rupiah		Proyeksi Penerimaan PAD Target: 1.767,75 Milyar rupiah		Data Obyek Pajak Potensial dan Inpotensial Target: 4 Laporan		
			Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya (%) Target: 52,50%	Tervalidasinya data potensi pajak daerah; PAP, PBB-KB, dan Pajak Rokok	Data potensi Wajib Pajak (PKB, PAP dan PBBKB) yang divalidasi: Target: 579,80 Milyar rupiah		Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
			Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi: Target: 1.686.707 Obyek (WP)		Lap. Pendataan obyek pajak Air Permukaan (4 Lap), Lap. Observasi konsumen, pemantauan dan penertiban BBM (4 Lap)		
			Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO Target: 2 sentra	Meningkatnya kualitas sentra layanan kesamsatan	Jumlah Samsat yang melakukan standardisasi sertifikasi ISO Target: 2 sentra		Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak Daerah.
		Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan dan peningkatan sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Potensi penerimaan retribusi OPD Penghasil yang terpungut (%) Target: 90 %	Tercapainya Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	Jumlah proyeksi penerimaan retribusi daerah Target: 23,81 Milyar Rupiah	BIDANG RETRIBUSI, DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA	Sub Bidang Retribusi
			Persentase Perangkat Daerah Penghasil yang melaksanakan Rekonsiliasi data retribusinya Target: 100 %	Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi data retribusi Target: 45 OPD		

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
				Meningkatnya keakurasian dana perimbangan	Jumlah proyeksi penerimaan Dana Perimbangan yang Target: 3.281,23 Milyar		Sub Bidang Dana Perimbangan
				Meningkatnya potensi penerimaan lain-lain pendapatan	Jumlah objek penerimaan Pendapatan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/diterima. Target: 16 Obyek		Sub Bidang Pendapatan Lainnya
					Proyeksi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Target: 70 Milyar		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Nilai Survei IKM Target: 82,50%	Menurunnya piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Tenaga Juru Sita Pajak yang tersedia Target: 10 Orang	BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN	Sub Bidang Hukum dan Sengketa Pajak
			Persentase penurunan WP berkategori TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang) kendaraan bermotornya Target: 47,50%	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak (Angka partisipasi aktif WP)	Frekuensi Operasi Penertiban Kendaraan bermotor yang dilaksanakan. Target: 1.320 kali		Sub Bidang Pembinaan
			Penilaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Target: Nilai 65 point	Meningkatnya apresiasi masyarakat atas layanan publik	Laporan survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesamsatan yang disusun Target: 10 Dokumen		Sub Bidang Pengendalian

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
		Meningkatnya kualitas Perencanaan, Sistem Akuntabilitas kinerja dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Teknologi Informasi	Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai Target: 65 point	Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Lainnya	Jumlah laporan kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Evaluasi lainnya Target: 43 Dokumen	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Subbid Analisis dan Pelaporan
			Tingkat gangguan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi (%) Target: 1,7 %	Meningkatnya Keakurasian Sistem Perencanaan berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra; Renja) dan Anggaran berbasis kinerja yang akuntabel (RKA/DPA; RKAP/DPPA) serta berbasis Teknologi Informasi. Target: 47 Dokumen		Subbid Program
				Meningkatnya keakurasian data proyeksi pendapatan daerah	Dokumen Penetapan Target Pendapatan (Berita Acara Penetapan Target) Target: 2 Dokumen		
				Meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah	Simpul jaringan informasi yang dikembangkan Target: 63 Titik		Subbid Teknologi Informasi Pendapatan
					Pengembangan teknologi informasi dan Inovasi pendapatan Daerah Target: 10 Paket/Aplikasi		
		Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang	Rasio cakupan sentra layanan PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (Sentra/Jml Wajib Pajak) Target: skala 1 : 110	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur (ASN)	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif (Orang) Target: 35 Orang	SEKRETARIAT	Subbag Umum dan Kepegawaian

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
		operasional kantor dan kinerja aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif Target: 35%		Jumlah Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi (Orang) Target: 12 Orang		
			Laporan Keuangan dan Aset BMD berkualitas mendukung Opini "WTP" Target: 1 Dokumen	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang berkualitas dan akuntabel Target: 11 Dokumen		Subbag Keuangan
				Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Laporan Aset BMD yang berkualitas (Laporan) Target: 11 Dokumen		Subbag Perlengkapan
		Tercapainya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan PKB dan BBNKB Target: 100%	Meningkatnya kelancaran Administrasi perkantoran, Asset BMD dan Laporan Keuangan UPT	Laporan Tahunan UPTB-UPPD yang disusun Target: 10 Dokumen Laporan periodik data penetapan, pembatalan, pembayaran, penghapusan, pengurangan, keringanan dan tunggakan pajak daerah Target: 10 Dokumen Laporan Aset BMD yang berkualitas (Laporan) Target: 10 Dokumen Laporan Pelaksanaan Pekan panutan Pajak pada masing-masing wilayah kesamsatan Target: 10 Dokumen	UPTB - UPPD	Subbag Tata Usaha

KEPALA BADAN (ESELON II)		KEPALA BIDANG (ESELON III)		KEPALA SEKSI/SUBBID (ESELON IV)		PENANGGUNGJAWAB	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Eselon III	Eselon IV
			Persentase WP yang melakukan Daftar Ulang (DU) Kendaraan Bermotornya Target: 47,50%	Tervalidasinya data potensi Wajib Pajak dan potensi Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	Data obyek kendaraan bermotor yang divalidasi Target: 1.686.707 Obyek		Seksi Pendataan dan Penetapan
				Tercapainya Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB	Jumlah proyeksi pendapatan PKB dan BBNKB (Milyar IDR) Target: 713,44 Milyar Rupiah		Seksi Pembayaran dan Penagihan
					Laporan realisasi pendapatan PKB dan BBNKB Target: 10 Dokumen		

RENCANA AKSI KINERJA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB

TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang gung Jawab	
		Uraian	Sat	Target	Rencana Aksi Triwulanan					Pagu (Rp)	APBD					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
1.	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Indikator Kinerja Utama)	%	7,64	1,48	3,73	5,94	7,64	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	12.550.914.260	2.438.860.051	6.126.348.271	9.765.121.055	12.550.914.260	BIDANG PAJAK DAERAH & UPTB KAB/KOTA SE NTB Subbid Adm dan Pelayanan Pajak Daerah Subbid PKB dan BBNKB
1	Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	2	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	%	45,53	8,85	22,22	35,42	45,53	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	562.681.500	109.338.762	274.655.915	437.789.061	562.681.500	
		3	Jumlah Penerimaan PAD	Milyar Rp.	1.719,19	334,07	839,17	1.337,60	1.719,19	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	6.282.101.760	1.220.721.192	3.066.417.510	4.887.730.320	6.282.101.760	
		4	Rasio Wajib Pajak (WP) yang melakukan Registrasi Ulang Kendaraan Bermotornya	%	52,93	10,29	25,84	41,18	52,93	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	952.327.500	185.053.730	464.849.796	740.949.474	952.327.500	
		5	Data potensi Wajib Pajak yang divalidasi:	WP	1.408.751	273.745	687.639	1.096.065	1.408.751	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	2.569.375.000	499.274.070	1.254.162.507	1.999.078.106	2.569.375.000	
			Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	%	105	20,40	51,25	81,69	105,00	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.901.228.500	369.441.631	928.027.050	1.479.232.992	1.901.228.500	
			Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	%	3,5	0,68	1,71	2,72	3,50	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	181.750.000	35.317.173	88.715.752	141.408.882	181.750.000	Subbid Pajak Daerah Lainnya
										Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	101.450.000	19.713.492	49.519.742	78.932.220	101.450.000	
		Jumlah Sasaran 1								12.550.914.260	2.438.860.051	6.126.348.271	9.765.121.055	12.550.914.260		
2.	Efektifnya pemungutan seluruh potensi	6	Potensi retribusi yang terpungut	%	100	19,43	48,81	77,80	100,00	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana	545.390.000	105.978.724	266.215.593	424.335.571	545.390.000	BIDANG RETRIBUSI DAERAH

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang gung Jawab
		Uraian	Sat	Target	Rencana Aksi Triwulanan					Pagu (Rp)	APBD				
					I	II	III	IV			Rencana Aksi Triwulanan				
					I	II	III	IV		I	II	III	IV		
	penerimaan pendapatan daerah	7 Perangkat Daerah Pengelola Penerimaan Retribusi Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang melaksanakan hasil kesepakatan	OPD	45	9	22	35	45	Perimbangan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	176.439.000	34.285.154	86.123.348	137.276.708	176.439.000	Subbid Dana Perimbangan
		8 Jumlah Retribusi yang terpungut	Milyar Rp.	33,29	6	16	26	33	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	235.650.000	45.790.877	115.025.403	183.345.271	235.650.000	Subbid Retribusi
		9 Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp.	3.281,37	637,63	1.601,70	2.553,04	3.281,37	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	1.281.097.000	248.939.339	625.328.660	996.745.498	1.281.097.000	Subbid Penerimaan Pendapatan Lain-lain
		10 Jumlah Penerimaan Pendapatan diluar Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar Rp.	413,60	80,37	201,89	321,80	413,60	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL Aplikasi retribusi dan ppl	122.110.000	23.728.088	59.604.294	95.006.540	122.110.000	
										-	-	-	-	-	
		Jumlah Sasaran 2								2.360.686.000	458.722.182	1.152.297.299	1.836.709.588	2.360.686.000	
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	-	-	-	85,00	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	331.997.500	64.512.865	162.054.514	258.307.539	331.997.500	BIDANG PENGENDALI AN DAN PEMBINAAN
		12 Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawai	%	100	19,43	48,81	77,80	100,00	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	1.727.807.500	335.742.927	843.376.847	1.344.304.411	1.727.807.500	
		13 Jumlah Samsat/UPTB dengan IKM berkriteria "Sangat Baik"	Unit	10	2	5	8	10							
		Jumlah Sasaran 3								2.059.805.000	400.255.792	1.005.431.361	1.602.611.950	2.059.805.000	
4	Menigkatnya kualitas perencanaan, serta ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja;	14 Persentase Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data	%	85	16,52	41,49	66,13	85,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
		15 Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi	Point	60	11,66	29,29	46,68	60,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	250.010.000	91.600.000	64.910.000	34.250.000	59.250.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang gung Jawab
		Uraian	Sat	Target	Rencana Aksi Triwulanan					Pagu (Rp)	APBD				
					I	II	III	IV			Rencana Aksi Triwulanan				
										I	II	III	IV		
		Pemerintah (LKjIP) oleh Instansi penilai							ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD	478.965.000	47.400.000	160.400.000	145.582.500	125.582.500	Subbid peny. Program
									Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	230.713.700	74.413.700	41.000.000	94.300.000	21.000.000	Subbid Analisis Pelaporan
Jumlah Sasaran 4										959.688.700	213.413.700	266.310.000	274.132.500	205.832.500	
5	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi dan invasi layanan pendapatan daerah;	16 Tingkat gangguan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi Pendapatan	%	1,7	-	0,85	-	1,70	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	517.415.440	77.636.000	171.636.000	190.176.500	77.966.940	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Subbid IT
										667.977.450	104.943.490	343.537.785	117.980.980	101.515.195	Subbid IT
Jumlah Sasaran 5										1.185.392.890	182.579.490	515.173.785	308.157.480	179.482.135	
6	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	17 Persentase Aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal: S1; dan S2;	%	190	-	-	-	190,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	388.728.500	83.745.000	99.479.000	126.941.500	78.563.000	Sekretariat
		18 Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif	%	35	6,80	17,08	27,23	35,00	Pendidikan dan pelatihan formal	198.762.500	36.000.000	52.000.000	79.562.500	31.200.000	Subbag Umpeg
		19 Aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi	Orang	5	-	2	3		Peningkatan Mental dan Fisik Aaparatur	189.966.000	47.745.000	47.479.000	47.379.000	47.363.000	Subbag Umpeg

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang gung Jawab	
										APBD						
		Uraian	Sat	Target	Rencana Aksi Triwulanan					Pagu (Rp)	Rencana Aksi Triwulanan					
					I	II	III	IV			I	II	III	IV		
Jumlah Sasaran 6										388.728.500	83.745.000	99.479.000	126.941.500	78.563.000		
7	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan dukungan manajemen ketatalaksanaan dalam menopang operasional kantor dan kinerja aparatur	20	Penyampaian laporan Keuangan yang berkualitas dan akuntabel	Lap	1	-	1	-	-	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						sekretariat
		21	Penyampaian laporan Aset BMD yang tepat waktu dan tepat data	Lap	1	-	1	-	-	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	156.832.000	112.232.000	24.500.000	100.000	20.000.000	subbag keuangan
		22	Penyampaian Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dok	2	-	2	-	-	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah						
		23	Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja (1:110)	%	110	0	0	0	110	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	307.415.000	66.050.579	81.540.000	83.817.874	76.006.547	subbag keuangan
										Program Reformasi birokrasi	-					
										Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	260.000.000	54.000.000	69.000.000	72.420.000	64.580.000	Subbag Umpeg
										Program Penertiban pengelolaan keuangan dan asset	-					
										Peningkatan management asset/barang daerah	107.400.000	25.000.000	25.500.000	20.900.000	36.000.000	Subbag perlengkapan
										Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
										Penyediaan jasa surat menyurat	112.832.000	22.132.000	28.372.000	34.058.000	28.270.000	Subbag Umpeg
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.791.388.040	862.602.100	664.457.500	653.752.100	610.576.340	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang gung Jawab
										APBD					
		Uraian	Sat	Target	Rencana Aksi Triwulanan					Pagu (Rp)	Rencana Aksi Triwulanan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Penyediaan jasa administrasi keuangan	634.724.000	139.810.000	173.130.000	110.810.000	210.974.000	
									Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.236.673.160	487.693.000	622.889.700	460.968.000	665.122.460	
									Penyediaan alat tulis kantor	777.617.570	164.571.392	209.283.348	225.696.614	178.066.216	
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.534.029.500	173.700.000	188.544.000	856.606.000	315.179.500	
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	92.734.400	17.156.400	24.830.750	27.948.950	22.798.300	
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.504.918.000	1.181.050.000	686.300.000	1.207.750.000	429.818.000	
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	85.412.000	15.930.000	16.935.000	19.085.000	33.462.000	
									Penyediaan makanan dan minuman	465.400.000	79.103.500	109.479.700	135.990.000	140.826.800	
									Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	454.928.700	84.886.857	138.586.888	131.454.955	100.000.000	
									Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	455.800.000	98.000.000	174.050.000	98.000.000	85.750.000	
									Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1.214.186.280	297.216.000	329.665.760	208.854.000	378.450.520	
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
									Pembangunan gedung kantor	5.138.484.000	581.864.245	2.223.948.841	2.292.670.914	40.000.000	subbag per- lengkapan
									Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2.528.980.000	-	1.670.000.000	858.980.000	-	
									Pengadaan mebeleur	557.050.000	118.050.000	68.750.000	193.950.000	176.300.000	
									Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	458.482.000	71.394.550	75.865.450	177.614.000	133.608.000	

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja							Program/ Kegiatan	ANGGARAN					Penang gung Jawab
										APBD					
		Uraian	Sat	Target	Rencana Aksi Triwulanan					Pagu (Rp)	Rencana Aksi Triwulanan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	1.514.084.000	330.594.500	439.010.650	396.327.750	348.151.100	
									Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	230.032.000	40.597.516	61.696.668	68.607.000	59.130.816	
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	262.400.000	49.729.072	59.420.928	77.186.184	76.063.816	
									Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	645.100.000	203.000.000	245.200.000	140.700.000	56.200.000	
Jumlah Sasaran 7										26.526.902.650	5.276.363.711	8.410.957.183	8.554.247.341	4.285.334.415	
Jumlah Sasaran 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7										46.032.118.000	9.053.939.926	17.575.996.899	22.467.921.415	21.720.617.310	

- A UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD
B PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET RPJMD

No.	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN PERMASALAHAN	Upaya kedepan guna peningkatan Kinerja Bappenda Prov NTB
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih relatif rendah sedangkan struktur PAD sendiri masih didominasi penerimaan dari Pajak Daerah sedangkan peran Retribusi Daerah masih belum optimal.	Pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang sah, yang lebih baik serta intensifikasi pengelolaan aset-aset daerah.	1.Membangun sistem online pajak daerah dan retribusi daerah 2. Melakukan Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
2	Sarana dan prasarana pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah relatif terbatas jumlah dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah	Diupayakan untuk melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh SKPD Pengelola PAD serta Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan melalui Badan Usaha Milik Daerah	Optimalisasi / Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD

- C INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Mataram, Januari 2018
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembian Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153